



Kementerian PPN/
Bappenas



Ringkasan Eksekutif

PETA JALAN PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025-2045



Kementerian PPN/
Bappenas



Photo credit: @Edi Purnomo/INOVASI

Daftar Isi

- **Sistematika Penulisan**
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Analisis Situasi dan Isu Strategis
- Bab III Kerangka Pikir
- Bab IV Sasaran Pendidikan 2045
- Bab V Arah Kebijakan
- Bab VI Kaidah Pelaksanaan
- Bab VII Mekanisme Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan

Bab I Pendahuluan

- Memuat latar belakang penyusunan peta jalan: Pentingnya Pendidikan dalam Pembangunan Nasional.
- Fungsi Peta Jalan Pendidikan Indonesia untuk Menuju Indonesia Emas 2045.
 - Panduan dalam perumusan kebijakan jangka panjang.
 - Pedoman Para Pemangku Kepentingan dalam Bersinergi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

Bab III Kerangka Pikir

Memuat alur pikir yang digunakan dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia serta pilar-pilar yang menjadi pendukung terwujudnya sasaran utama Pembangunan pendidikan.

Bab V Arah Kebijakan

Memuat arah kebijakan, strategi, fokus pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan.

Bab VII Mekanisme Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan

Menjelaskan tentang mekanisme dari koordinasi pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- Proses Sinkronisasi Kebijakan Peta Jalan Pendidikan di dalam sistem perencanaan dari pusat sampai dengan daerah
- Pemantauan pelaksanaan, Evaluasi capaian, dan Pelaporan secara bertahap dan berkala.

Bab II

Analisis Situasi dan Isu Strategis

- Pengaruh Megatren Global terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. SDM Indonesia dalam menghadapi megatren global (kemanusiaan universal dan kewarganegaraan global, urbanisasi global, demografi penduduk dunia, perubahan lanskap lapangan kerja, pendidikan di tengah perkembangan teknologi, perubahan iklim).
- Penjabaran isu-isu strategis: ulasan capaian, masalah, dan tantangan pembangunan pendidikan berbasis data.

Bab IV

Sasaran Pendidikan 2045

Memuat sasaran, indikator, dan target pembangunan pendidikan 2045.

Bab VI

Kaidah Pelaksanaan

Memuat *enabling factor* yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan pendidikan (kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, reformasi birokrasi dan koordinasi lintas sektoral, serta kolaborasi pemangku kepentingan pendidikan).

1 Latar Belakang dan Tujuan Peta Jalan Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam membangun manusia bermoral dan beretika, mengembangkan SDM berkualitas untuk memperkuat daya saing bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Pendidikan memainkan peran sentral dalam pembangunan dan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan produktivitas nasional.



Panduan dalam perumusan kebijakan jangka panjang

- Peta Jalan Pendidikan Indonesia adalah acuan utama dalam perumusan kebijakan pendidikan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga harus berpedoman pada peta jalan ini, untuk memastikan pembangunan pendidikan terlaksana secara berkesinambungan.



Pedoman Para Pemangku Kepentingan dalam Bersinergi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Peta Jalan Pendidikan Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menjalankan peran dan fungsi secara efektif dalam membangun pendidikan sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Selain itu, para pemangku kepentingan diharapkan mampu mengembangkan arah kebijakan pendidikan yang fokus pada peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan.

2 Pentingnya Pendidikan dalam Pembangunan Nasional

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah memperkuat upaya pembangunan pendidikan berkualitas yang merata. Penyiapan manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan langkah strategis yang krusial, untuk memastikan keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada.



Pendidikan sebagai Wahana Membangun Manusia Berakhlak, Berbudi Pekerti Baik, dan Berkompeten

Secara khusus, pembangunan pendidikan merupakan fondasi awal untuk mendorong terciptanya manusia Indonesia dengan karakter yang kuat dan kepribadian yang utuh sebagai teladan yang ideal dalam menjalani kehidupan yang seimbang.



Pendidikan sebagai Sarana Mobilitas Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan

Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup individu serta masyarakat. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, seseorang dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, yang membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi



Pendidikan untuk Penguatan SDM Pembangunan Indonesia agar Dapat Berkontribusi di Panggung Dunia

Pendidikan berkualitas yang selaras dengan dinamika global berperan penting dalam meningkatkan daya saing global



Kementerian PPN/
Bappenas



Photo credit: @Edi Purnomo/INOVASI

Daftar Isi

- Sistematika Penulisan
- Bab I Pendahuluan
- **Bab II Analisis Situasi dan Isu Strategis**
- Bab III Kerangka Pikir
- Bab IV Sasaran Pendidikan 2045
- Bab V Arah Kebijakan
- Bab VI Kaidah Pelaksanaan
- Bab VII Mekanisme Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan

Megatren Global

Tren global yang memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan Indonesia

 Kemanusiaan Universal dan Kewarganegaraan Global	 Urbanisasi Global	 Demografi Penduduk Dunia	 Perubahan Lanskap Lapangan Kerja	 Pendidikan di Tengah Perkembangan Teknologi	 Perubahan Iklim
<p>Globalisasi membuat interaksi antarbangsa berlangsung semakin intensif, menembus batas-batas negara-bangsa. Manusia Indonesia perlu disiapkan menjadi bagian dari komunitas global yang turut berkontribusi dalam pembentukan peradaban dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus memperkuat solidaritas kemanusiaan universal. .</p>	<p>Pada tahun 2050, sekitar 68 persen dari penduduk dunia diproyeksikan tinggal di kawasan perkotaan, dengan 95 persen pertumbuhannya terjadi di <i>emerging economies</i> (negara berkembang)¹. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan ini perlu diiringi dengan penyediaan layanan pendidikan yang optimal.</p>	<p>Populasi penduduk dunia sedang mengalami perubahan signifikan, terutama di negara-negara maju yang sedang menghadapi penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran. Di sisi lain, beberapa negara berkembang seperti Indonesia masih memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, dengan potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi besar di masa depan.</p>	<p>Kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir memicu perubahan lanskap lapangan kerja. Di Indonesia, lebih dari 10% tenaga kerja tergantikan oleh mesin yang meliputi operator, pekerja keterampilan dasar, dan pekerja pertanian terampil. Sementara itu, sebesar 62% pekerjaan baru akan hadir di sektor konstruksi, transportasi, pariwisata, dan industri retail².</p>	<p>Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat mempercepat pencapaian target, memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mempercepat distribusi materi. Namun, ada kekhawatiran terkait kecanduan internet, penyebaran informasi palsu, <i>cyber crime</i>, dan <i>cyber bullying</i> ³.</p>	<p>Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari⁴. Pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan khususnya terkait perubahan iklim merupakan strategi yang sangat penting dalam membantu masyarakat memahami dan menghadapi dampaknya.</p>

Sumber:

¹ United Nations. (2018). <https://www.un.org/uk/desa/68-world-population-projected-live-urban-areas-2050-says-un>

² id.Wikipedia.org/wiki/Daftar_populasi_negara_menurut_waktu

³ Cisco, Oxford Economies. Analisa Kearney

⁴ Shatri, Z. G. (2020). Advantages and disadvantages of using information technology in learning process of students. Journal of Turkish Science Education, 17(3), 420–428. <https://doi.org/10.36681/tused.2020.36>

⁵ United Nations Environment Programme. (2024). Global Resources Outlook 2024. doi: wedocs.unep.org/20.500.11822/44901

Akses Pendidikan Berkualitas Masih Belum Merata (1/2)

Akses dan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah



64,79% anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah menempuh PAUD (untuk layanan TK/RA/BA)¹

36,36% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (2023)¹



29.830 desa/kelurahan tidak memiliki satuan PAUD (TK/RA/BA)²

Sumber:

¹ Susenas BPS, berbagai tahun

² Podes BPS, 2021

³ Dapodik Kemendikbudristek dan EMIS Kemenag, 2023

Pemanfaatan bantuan masih belum optimal dan kurangnya dukungan infrastruktur

✔ Bantuan pendidikan terbilang efektif

75,89%
(2023)¹

Peningkatan APK SMA/SMK/MA/Sederajat dari kelompok 20% penduduk termiskin

34,82%
(2010)

⚠ Namun, angka *exclusion error* masih tinggi

1.377.854

anak dari kelompok 25% termiskin tidak bersekolah¹



Keterbatasan akses internet dan listrik menjadi kendala dalam perluasan akses pendidikan terutama dalam rangka implementasi pembelajaran digital



27.650 (10,03 %)

satuan pendidikan belum memiliki akses internet³



302

kecamatan tidak memiliki SMP/MTs²



3.323 (1,21 %)

satuan pendidikan belum memiliki akses listrik³

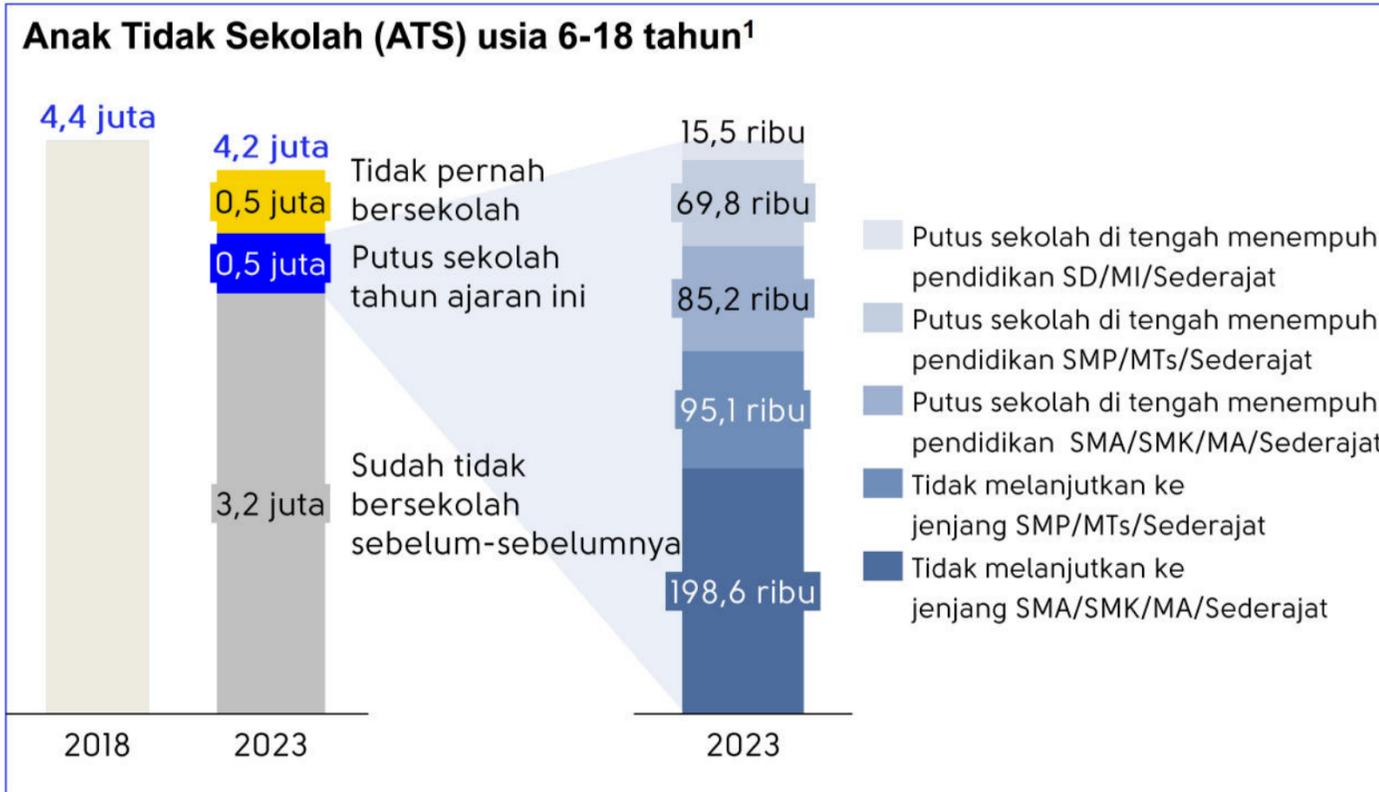


727

kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA²

Akses Pendidikan Berkualitas Masih Belum Merata (2/2)

Kesenjangan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah



➤ Angka Tidak Sekolah (ATS) cenderung menurun, namun tetap tinggi

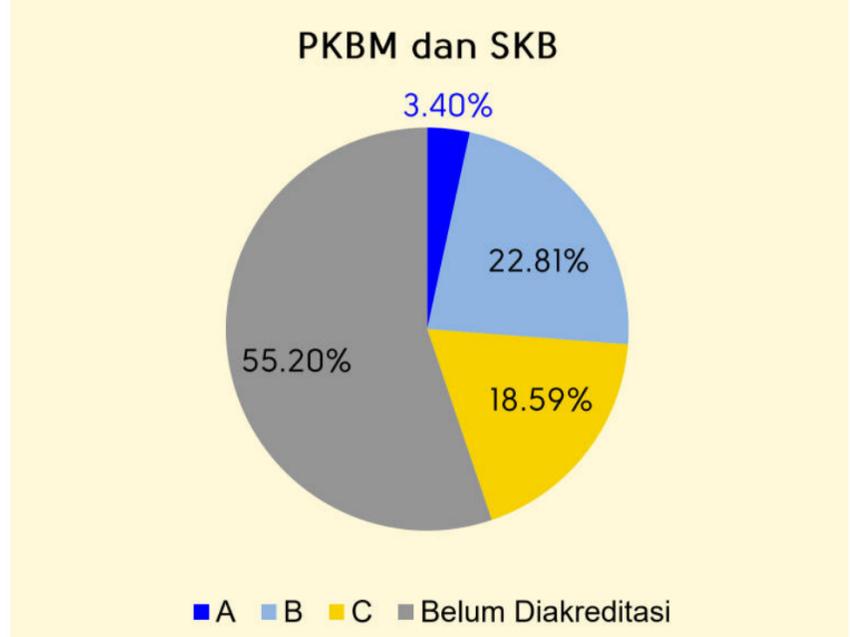
Faktor utama penyebab ATS tinggi:

- Ekonomi dan kemiskinan
- Hambatan sosial budaya dan persepsi yang salah terhadap pendidikan
- Keterbatasan akses dan jangkauan layanan pendidikan
- Kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja

Belum optimalnya jalur pendidikan nonformal sebagai alternatif akses



Namun, masih banyak layanan pendidikan nonformal yang belum diakreditasi²



Isu lintas sektor pada anak tidak sekolah

- Anak di daerah khusus
- Anak-anak penyandang disabilitas
- Pekerja anak
- Anak terlantar
- Anak korban kekerasan
- Anak korban perkawinan anak
- Anak berkonflik dengan hukum
- Anak jalanan

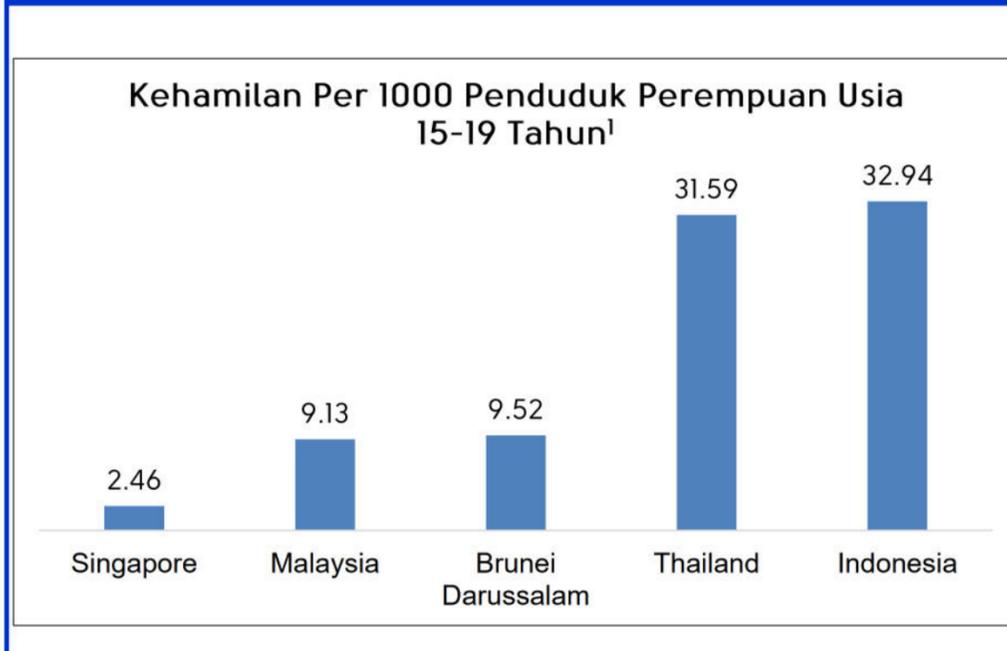
Sumber:
¹ Susenas BPS, berbagai tahun
² Neraca Pendidikan Daerah untuk Nasional, Kemendikbudristek, 2023

Masih maraknya masalah-masalah sosial yang menghambat anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan secara berkualitas.

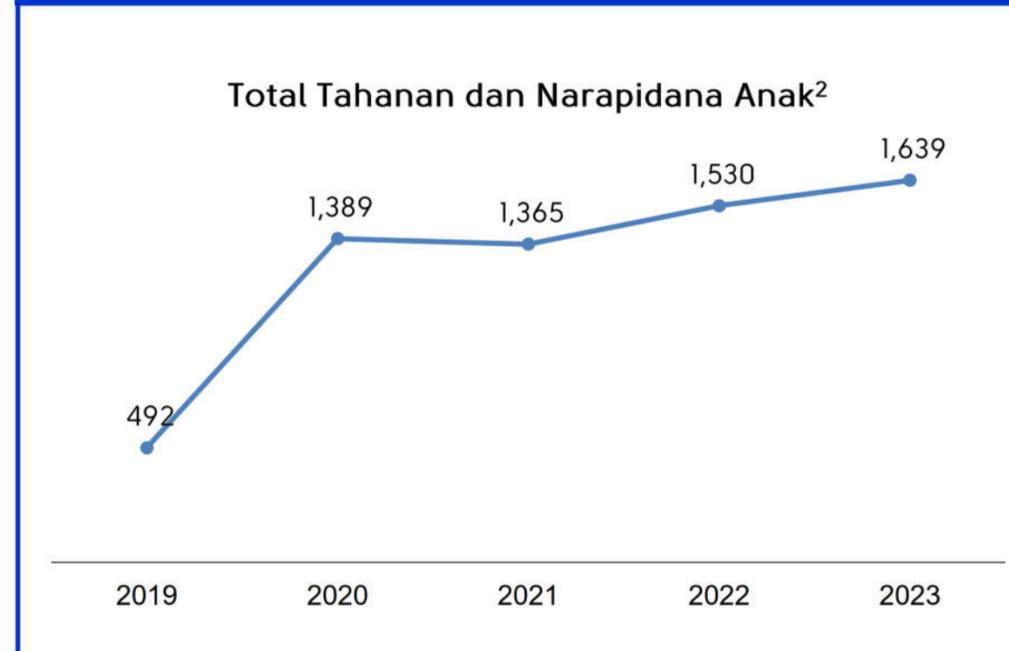


Lingkungan yang kurang kondusif di sekitar anak menjadi pemicu utama munculnya berbagai masalah sosial yang mereka hadapi. Ketidakstabilan sosial dalam masyarakat, tekanan ekonomi, serta minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, dapat menghambat perkembangan anak, bahkan mendorong mereka terjerumus ke dalam masalah sosial serius seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan kehamilan di usia dini. Berbagai macam masalah ini berdampak pada banyaknya anak yang kesulitan beradaptasi di lingkungan pendidikan, mengalami penurunan prestasi, dan lebih rentan terhadap risiko putus sekolah.

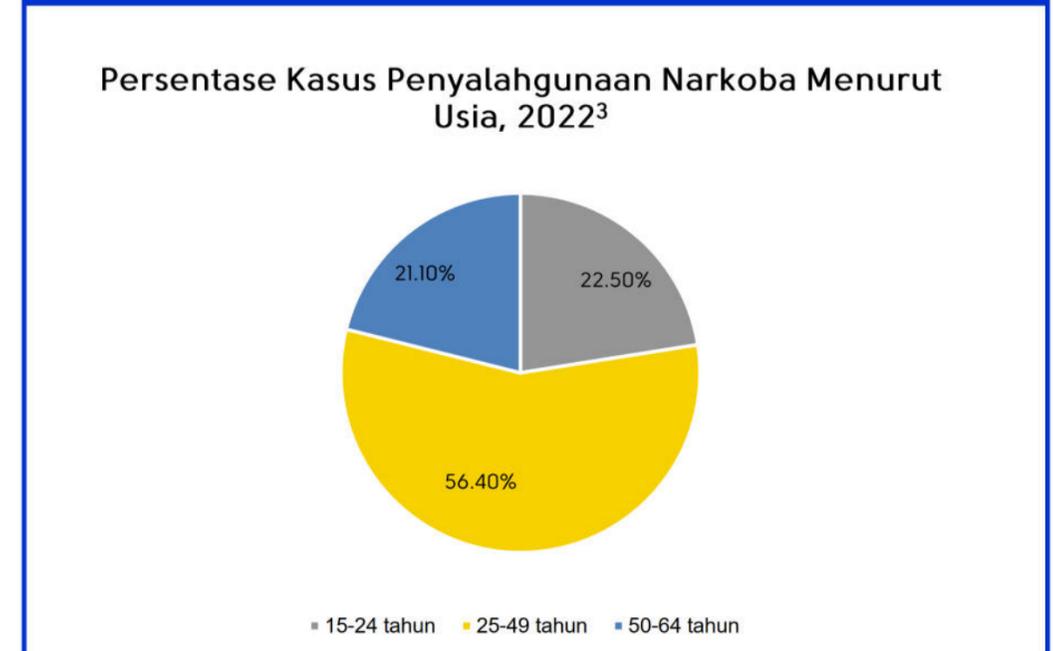
Masih tingginya angka kehamilan di usia anak di Indonesia.



Masih tingginya anak yang terlibat dalam kasus kriminal.



Masih tingginya anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.



Sumber:

¹ World Bank, 2024

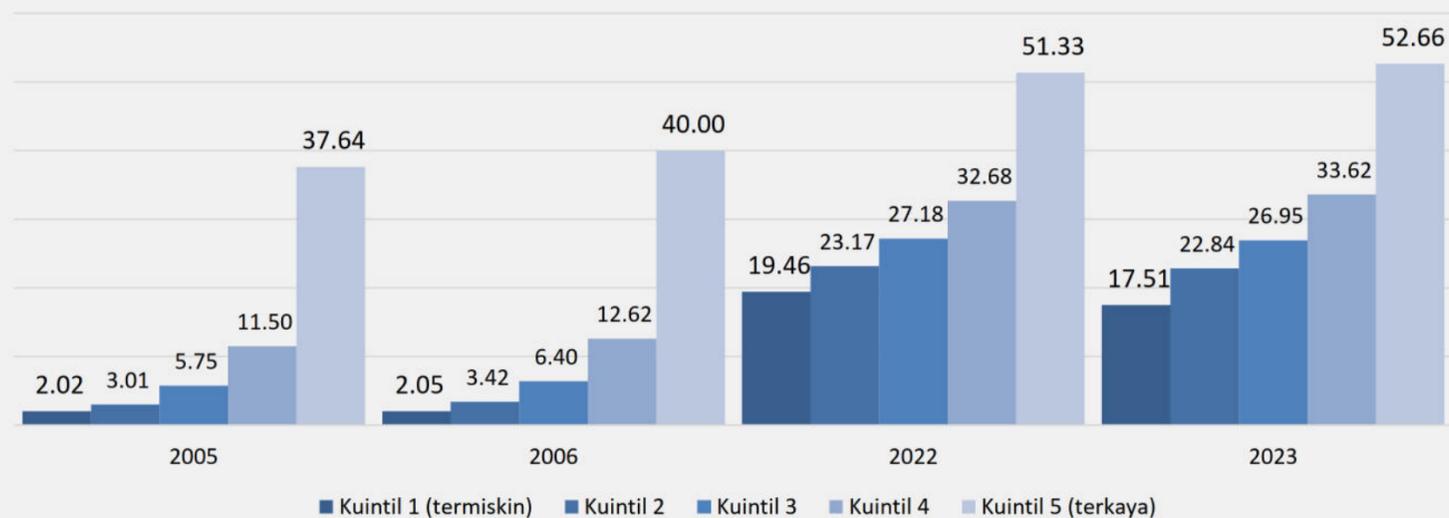
² Berdasarkan Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP); Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024.

³ Indonesia Drugs Report 2022; BNN 2022

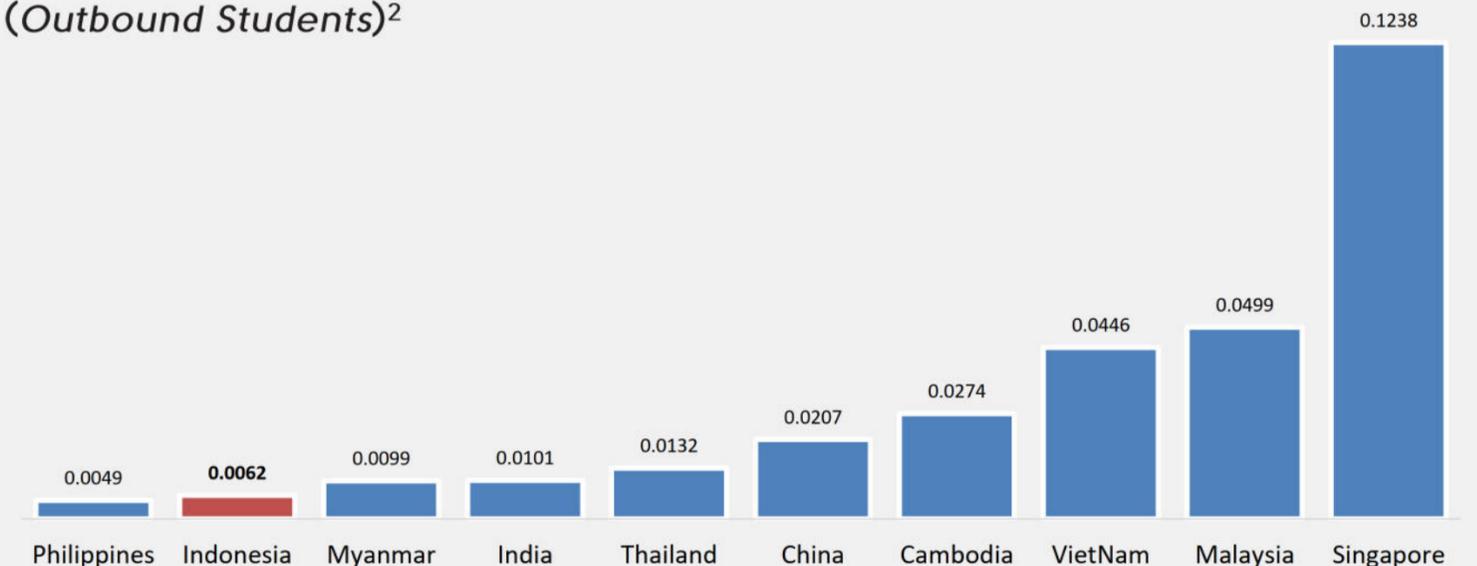
Rendahnya Partisipasi Masyarakat ke Jenjang Pendidikan Tinggi Berkualitas

- Tingkat keberlanjutan pendidikan ke jenjang lebih tinggi masih menghadapi tantangan, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia meningkat dari 13,10% pada 2005 menjadi 31,45% pada 2023, namun masih jauh tertinggal dibandingkan negara maju seperti Singapura, AS, dan China.
- Akses pendidikan tinggi di Indonesia masih terkendala oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
- Program bantuan pendidikan seperti Bidikmisi, KIP Kuliah, dan Beasiswa ADik perlu diperkuat dan dioptimalkan untuk memperluas akses pendidikan.
- Rasio pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di luar negeri (0,006) masih sangat rendah dibandingkan negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2005-2023¹



Rasio Rata-rata Mahasiswa Internasional di Luar Negeri, 2016-2020
(*Outbound Students*)²



Sumber:

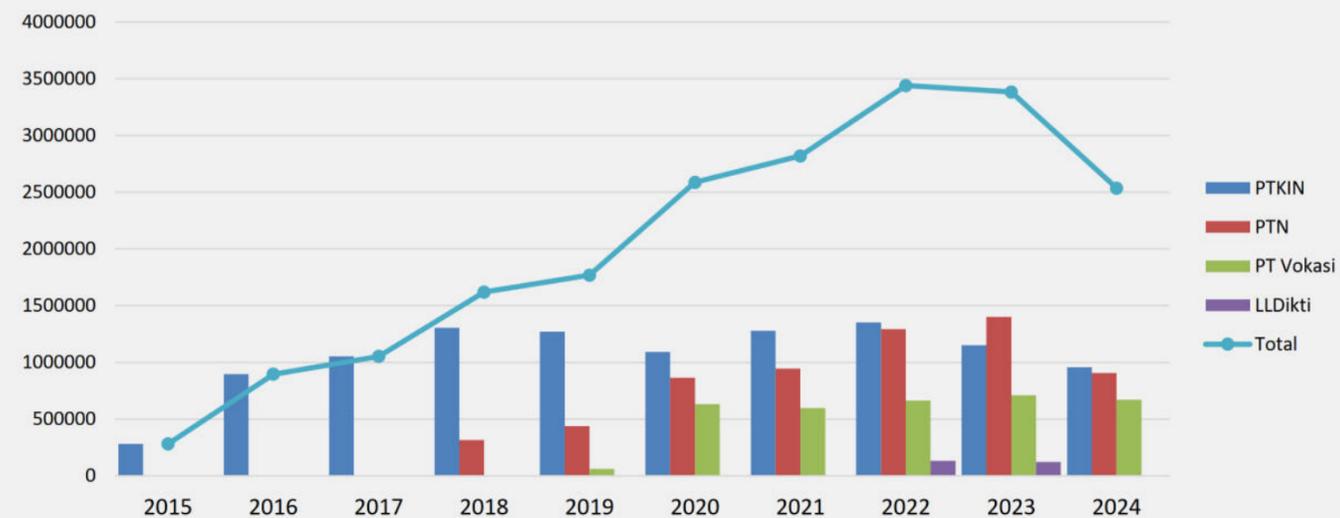
¹ Susenas BPS, berbagai tahun

² UNESCO Institute for Statistics (2012-2020)

Belum Meratanya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Esensial Pendidikan Tinggi

- Masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kualitas infrastruktur esensial perguruan tinggi, terutama di luar Pulau Jawa.
- Perguruan tinggi perlu mengatasi kesenjangan teknologi untuk beradaptasi dengan era digital, tantangan berupa keterbatasan akses internet, listrik, dan standar penerapan MOOCs.
- Alokasi anggaran pendidikan tinggi masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, dan kontribusi pemerintah daerah terbatas pada hibah lahan dan prasarana minimal.

Capaian Realisasi SBSN untuk Penguatan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi³

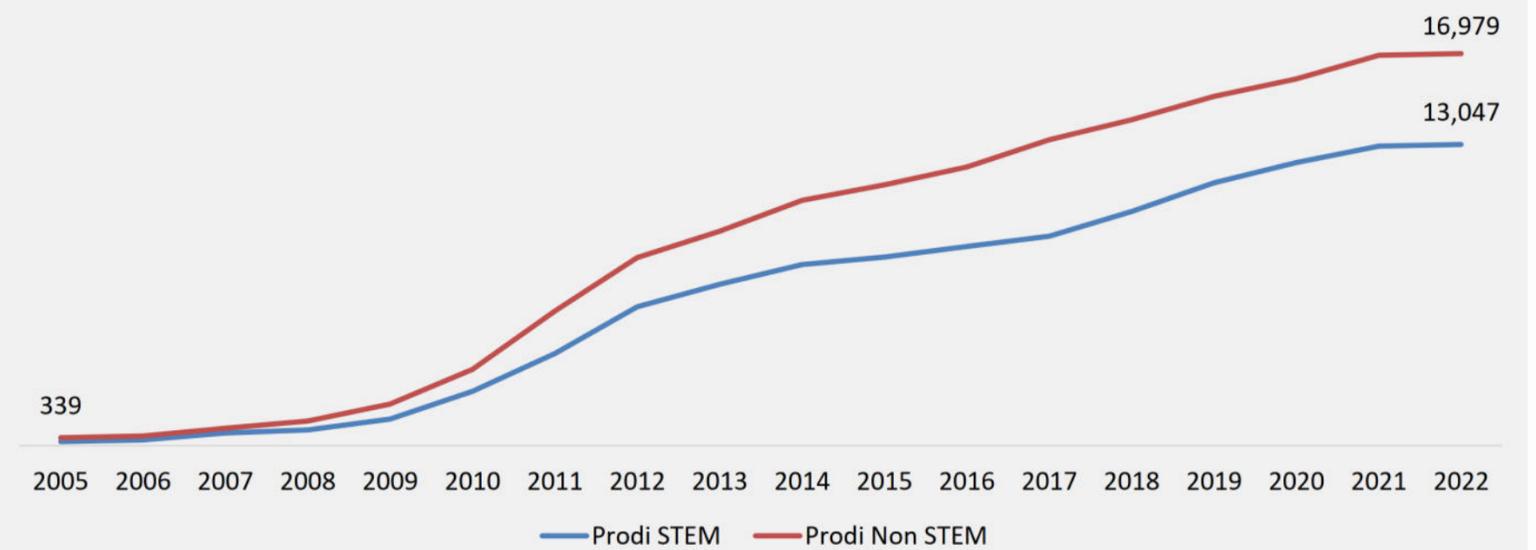


Sumber:
³ Hasil Survei Kemendikbud dan Kemenag, 2024
⁴ PDDikti Kemendikbudristek, 2005-2022

Belum berkembangnya pembelajaran STEAM dan perlunya proporsionalitas bidang ilmu STEAM di perguruan tinggi

- Pendekatan STEAM mengintegrasikan cipta, rasa, dan karsa (*Arts*) ke dalam STEM untuk mendorong kreativitas dan inovasi, namun penerapannya masih terbatas.
- Kesenjangan antara lulusan STEM dan non-STEM di Indonesia masih signifikan, dengan kontribusi lulusan STEM di industri prioritas jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.
- Meskipun pendekatan STEAM mulai diadaptasi melalui program studi interdisipliner dan proyek pengabdian masyarakat, namun tantangan dalam meningkatkan proporsi lulusan STEM dan mengintegrasikan cipta, rasa, dan karsa (*Arts*) secara efektif masih perlu diatasi.

Perkembangan Program Studi STEM dan Non-STEM⁴



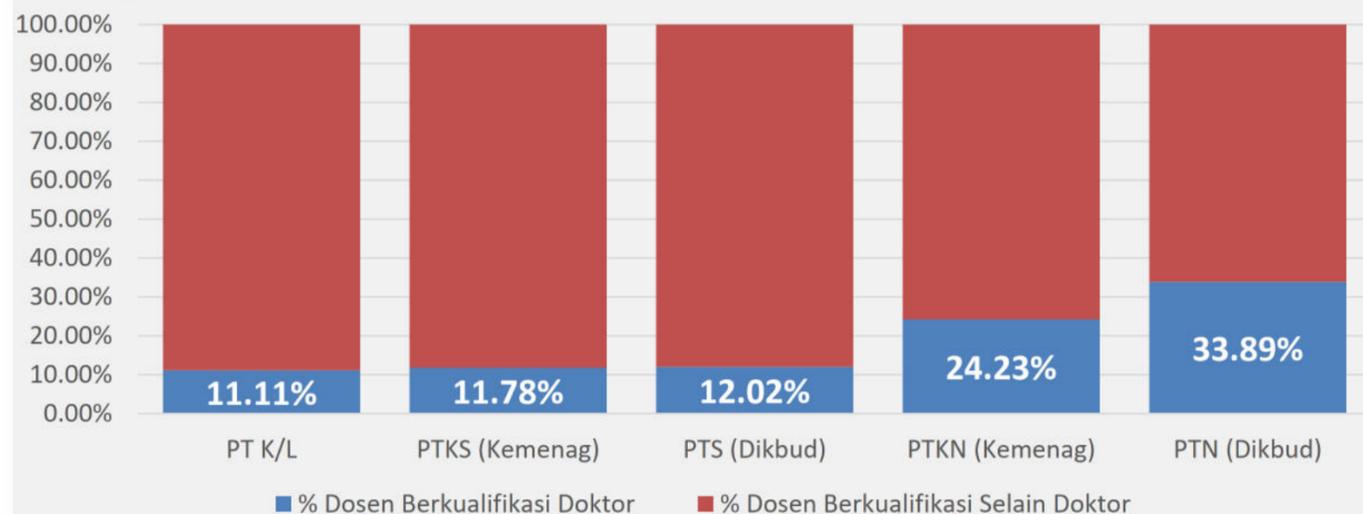
Masih belum meratanya kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi

- Proporsi dosen berkualifikasi S3 masih rendah, hanya 18,44 persen, dan tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia seperti Jepang, Brunei Darussalam, dan Malaysia, yang berdampak pada kualitas lulusan dan produksi pengetahuan di perguruan tinggi.
- Distribusi dosen S3 tidak merata, dengan mayoritas tersebar di Jawa dan Sulawesi, sementara wilayah lain seperti Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan Maluku-Papua memiliki proporsi dosen S3 yang sangat rendah, di bawah 15 persen.

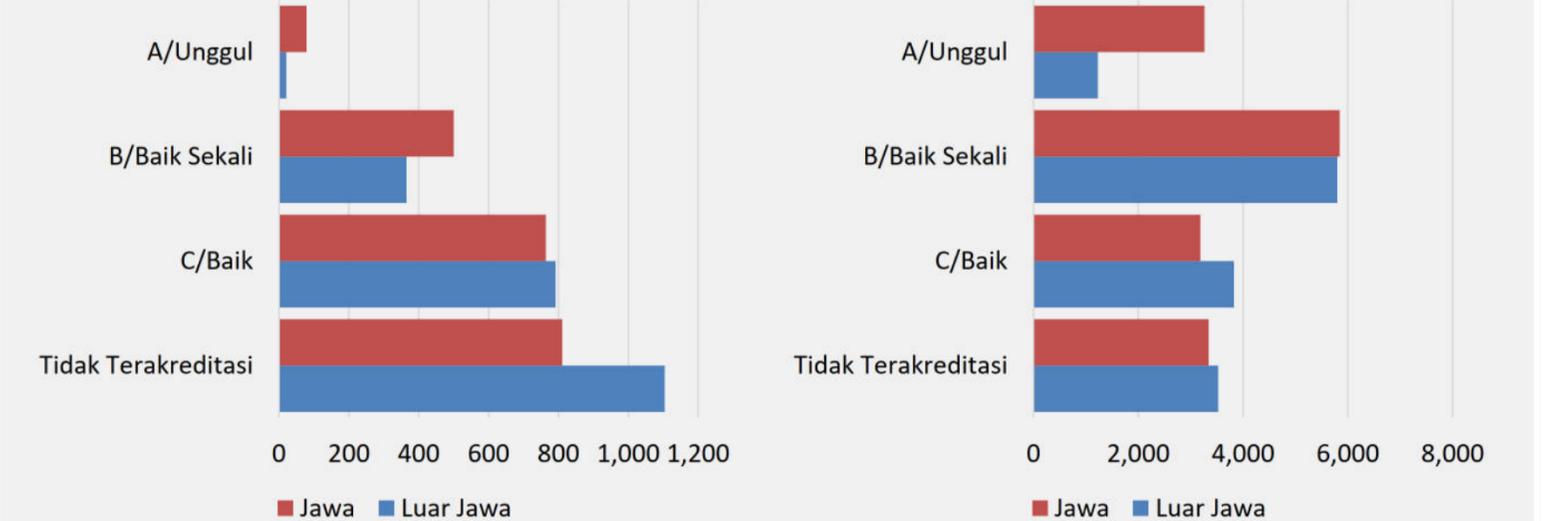
Belum Optimalnya Kualitas Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Perguruan tinggi masih menghadapi tantangan dalam menyediakan lingkungan yang sehat, aman, inklusif, dan nyaman bagi seluruh civitas academica.
- Masalah seperti terbatasnya fasilitas ramah disabilitas, keamanan, dan kekerasan seksual masih menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan akademis yang kondusif.
- Kurangnya pemahaman, pelatihan, dan evaluasi yang tidak dilakukan secara periodik menjadi penghambat peningkatan mutu dan efektivitas SPMI di perguruan tinggi.

Persentase Kualifikasi Pendidikan Dosen Berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi⁵



Sebaran Perguruan Tinggi (kiri) dan Program Studi (kanan) menurut Status Akreditasi⁶



Sumber:

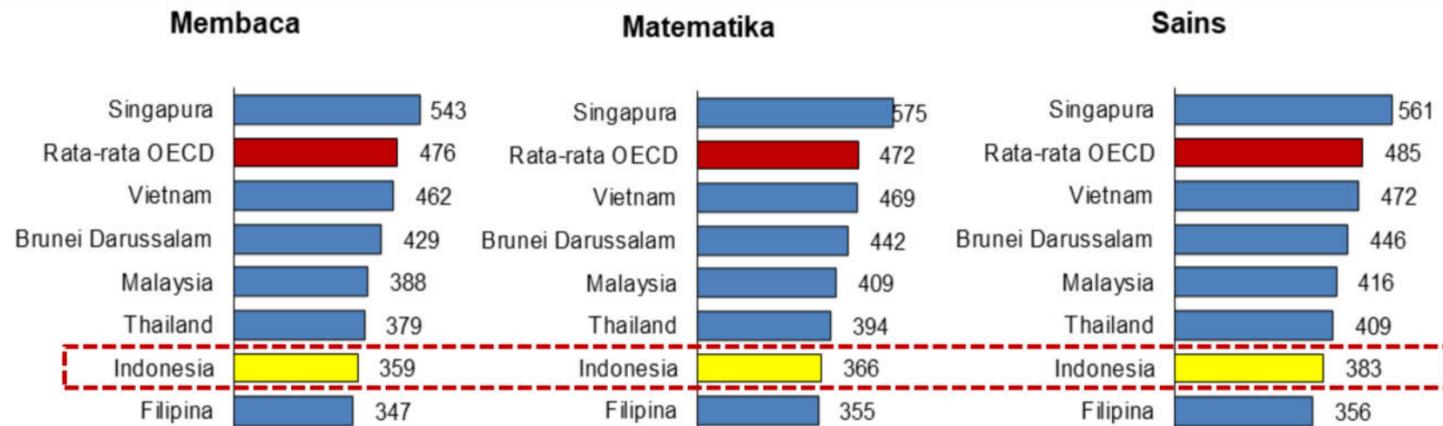
⁵ PDDikti Kemendikbudristek, 2022

⁶ PDDikti Kemendikbudristek, 2022

Kualitas layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan

Capaian peserta didik pada kompetensi esensial serta kualitas pembelajaran yang belum optimal

Kualitas pendidikan Indonesia masih rendah dan berada pada posisi ke-6 dari 7 negara¹



Ekosistem satuan pendidikan yang belum sepenuhnya menghadirkan rasa aman dan menjaga kesejahteraan psikologis warga satuan pendidikan



15,30% peserta didik pernah mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir²

3.194 kasus pengaduan perlindungan anak bidang pendidikan sepanjang tahun 2016-2020³

Perlu koordinasi sistematis dalam menjaga tumbuh kembang anak usia dini optimal

- Penyediaan layanan PAUD-HI tidak hanya dipenuhi oleh satuan PAUD secara mandiri, namun dapat bermitra dengan unit layanan lain, misal: posyandu.
- Namun, pelaksanaan program holistik-integratif belum sepenuhnya berjalan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Hambatan pelaksanaan

- Sinkronisasi program antar sektor dalam mendukung PAUD-HI
- Minimnya sosialisasi dari dinas atau pemerintah setempat terkait PAUD-HI
- Kurangnya keterlibatan orang tua dalam layanan PAUD-HI
- Belum optimalnya pemahaman guru terhadap PAUD-HI

Tiga jenis kasus pengaduan perlindungan anak pada bidang pendidikan selama tahun 2016 hingga 2020³:



Tawuran pelajar



Kekerasan di sekolah (perundungan)



Anak dikeluarkan karena hamil, pungli, penyevelan sekolah, tidak boleh ikut ujian, putus sekolah, dll

Sumber:

¹ Programme for International Student Assessment (PISA), OECD, 2022

² Asesmen Nasional Kemendikbudristek, 2023

³ Bank Data KPAI, 2020. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

Kualitas layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan juga perlu ditingkatkan (1/2)

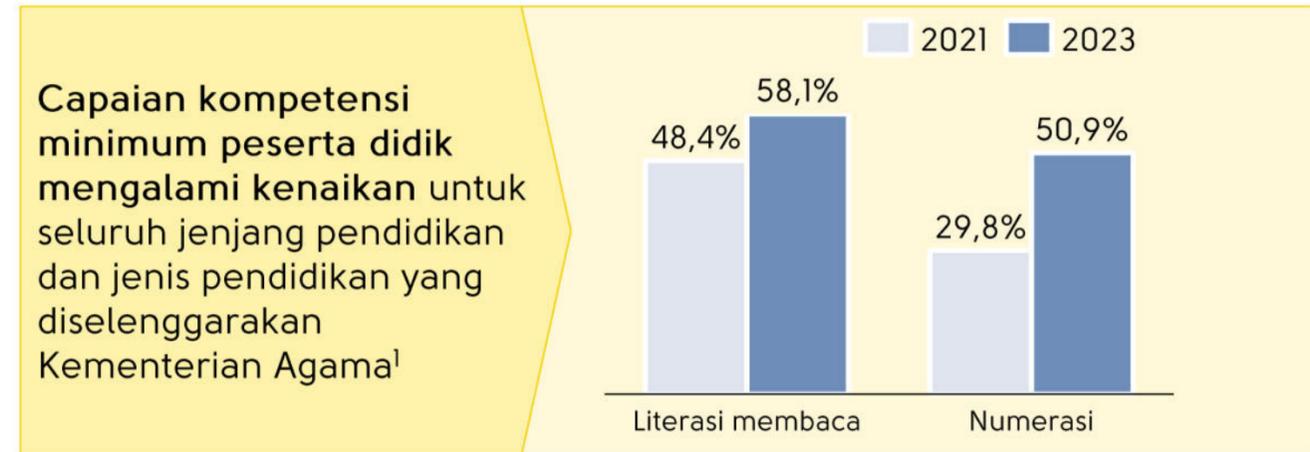
Perlunya penguatan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan

- Pendidikan keagamaan memiliki peran strategis, untuk:
 - menyiapkan ahli agama dan profesi di bidang agama
 - memberikan suplemen pembelajaran agama bagi siswa di sekolah/pesantren dan mahasiswa perguruan tinggi
- Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki kontribusi tinggi pada capaian APK semua jenjang pendidikan.
- Namun, kapasitas lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan belum optimal. Sebagian besar didirikan dan dikelola oleh masyarakat dengan sumber daya terbatas dan berbasis keluarga yang belum sepenuhnya profesional dan akuntabel.

Perlunya penguatan mekanisme rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan

- Lulusan masih terkendala melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan mengakses dunia kerja sektor formal.
- Jumlah peserta didik besar (sebanyak 6,3 juta orang), namun lulusannya belum mendapatkan rekognisi yang setara dengan lulusan pendidikan formal.

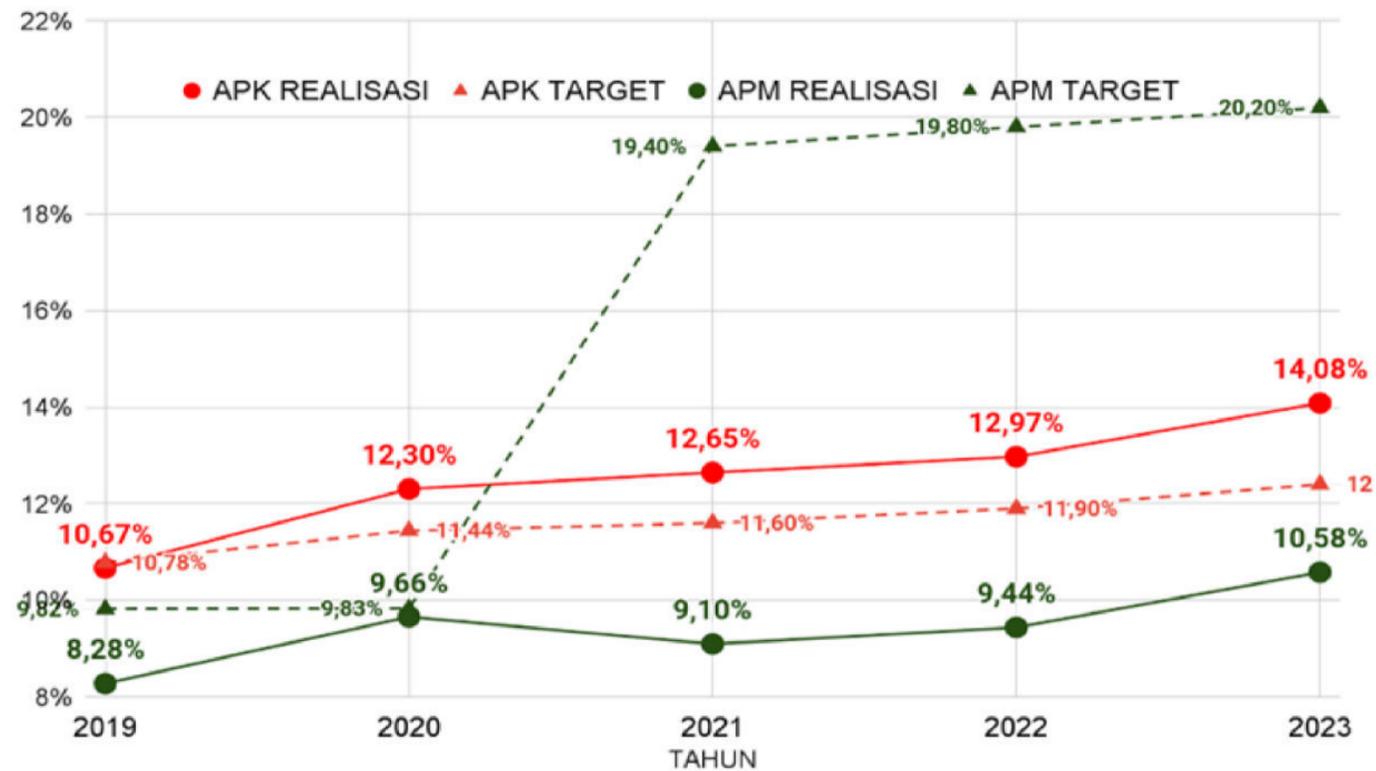
Perlunya peningkatan penjaminan mutu layanan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan



- Jumlah lembaga pendidikan pesantren terakreditasi masih sangat rendah, baru 70 lembaga dari 1.998 lembaga Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (PKPPS).
- Sementara itu, hasil penjaminan mutu kelembagaan pada jenjang Ma'had Aly menunjukkan bahwa dari 79 lembaga, sebanyak 21 mendapatkan predikat mumtaz (setara A), 41 lembaga mendapatkan predikat jayyid (setara B), dan 8 mendapatkan predikat maqbul (setara C).

Kualitas layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan juga perlu ditingkatkan (2/2)

Kontribusi APK Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama terhadap APK Nasional¹



Sumber:

¹ Kementerian Agama, 2024

² Asesmen Nasional Kemendikbudristek, 2023

Capaian Asesmen Nasional Peserta Didik Kementerian Agama²

Satuan Pendidikan	Persentase Jumlah Siswa di Atas Kompetensi Minimum					
	Literasi Membaca			Numerasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Umum	48,37%	53,33%	58,25%	29,75%	37,44%	51,02%
MI	46,94%	54,28%	56,90%	24,78%	38,08%	46,44%
MTs	47,84%	54,47%	58,42%	33,05%	35,84%	52,53%
MA/MAK	52,38%	49,07%	60,44%	32,13%	39,61%	56,43%
Kesetaraan	53,09%	46,21%	53,05%	35,71%	33,06%	47,32%
Paket A/Ula	58,76%	55,65%	62,35%	33,89%	40,83%	48,77%
Paket B/Wustha	51,62%	48,95%	54,29%	36,94%	32,30%	46,58%
Paket C/Ulya	54,55%	39,46%	49,07%	32,32%	32,87%	48,33%
Keagamaan	41,32%	40,05%	48,34%	27,74%	31,32%	47,01%
Adi WP	65,52%	76,06%	70,37%	41,38%	49,30%	61,73%
SDTK	81,10%	75,27%	88,21%	47,12%	62,63%	71,12%
Madya WP	55,00%	32,26%	65,33%	75,00%	29,03%	60,00%
SMPTK	29,46%	41,53%	37,40%	30,54%	29,38%	36,59%
SMAg.K	52,85%	45,59%	55,57%	28,49%	32,57%	52,96%
SMAK	31,94%	32,30%	39,49%	24,94%	27,13%	42,70%
SMTK	25,92%	24,57%	36,45%	18,88%	22,26%	40,77%
Utama WP	57,76%	45,74%	63,79%	27,59%	37,98%	55,93%
Seluruh Jenis dan Jenjang Pendidikan di Kemenag	48,39%	53,12%	58,07%	29,79%	37,32%	50,91%

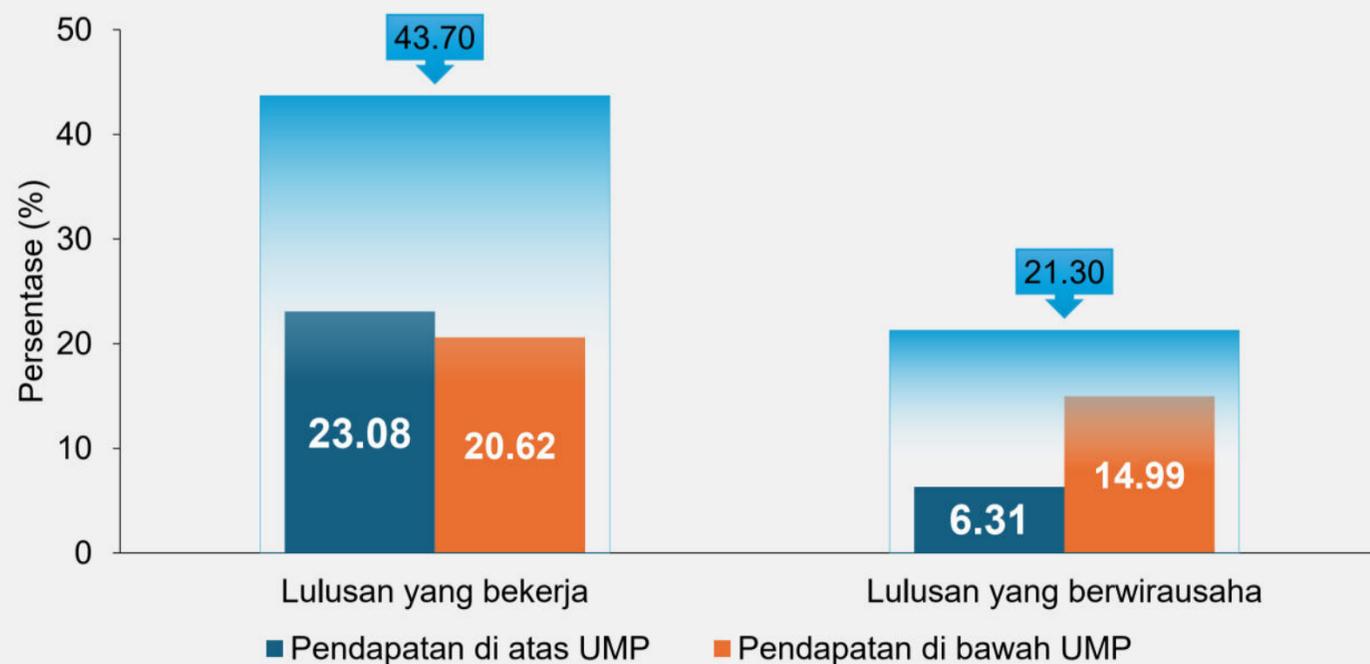
Pendidikan Vokasi Belum Sepenuhnya Selaras dengan Kebutuhan Industri

- Pendidikan vokasi (SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi) belum optimal dalam menghasilkan lulusan yang mudah terserap di pasar kerja dan berwirausaha, terutama dalam bidang-bidang yang memerlukan keterampilan tinggi.
- Pendidikan tinggi vokasi menghadapi tantangan dalam meningkatkan fleksibilitas dan relevansi dengan dunia industri.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang Kurang Produktif

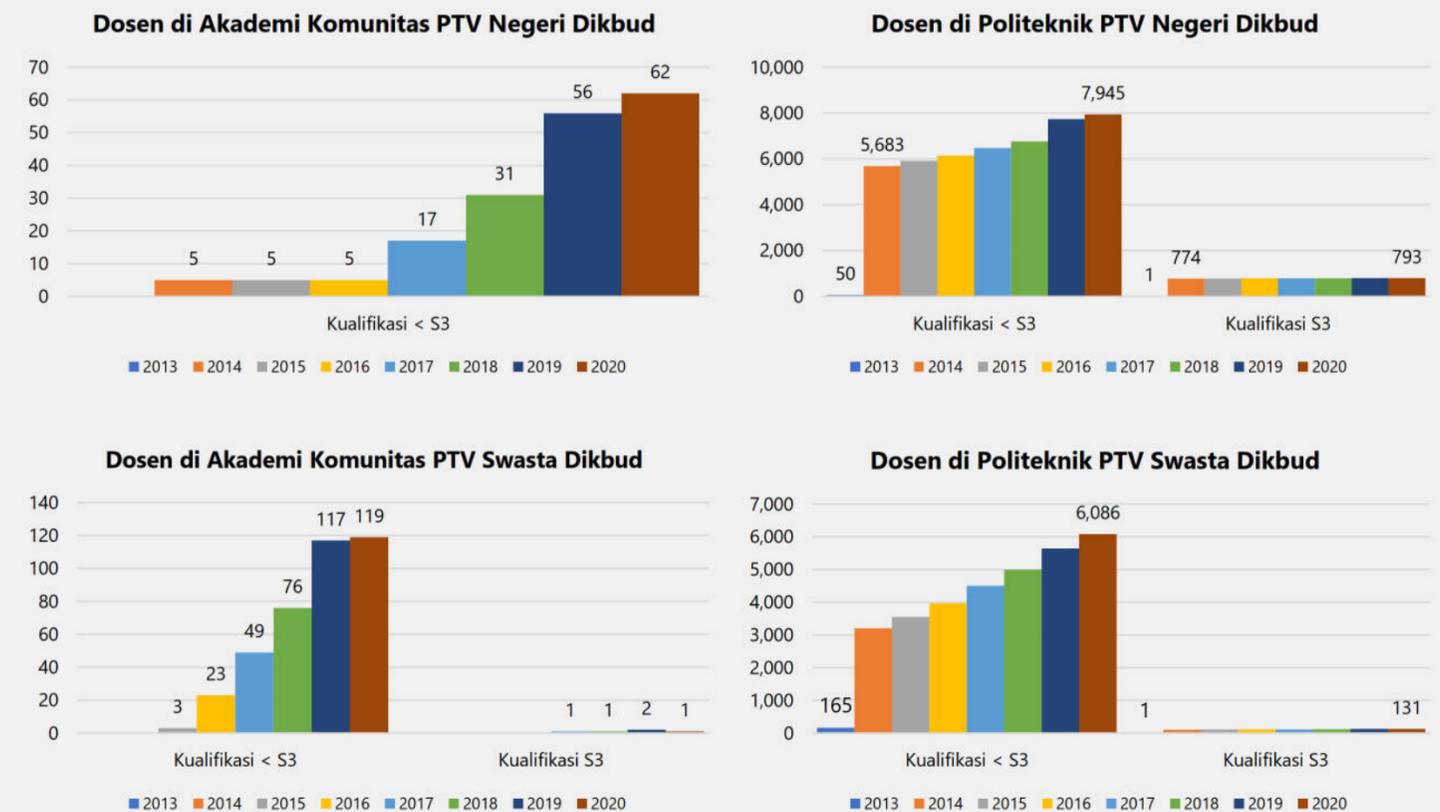
- Sebagian besar pendidik vokasi belum memiliki pengalaman langsung di dunia industri, sehingga kesulitan memberikan gambaran yang komprehensif kepada peserta didik mengenai dunia kerja.
- Belum tersertifikasinya para pendidik di pendidikan vokasi secara optimal, sehingga berpengaruh pada pemanfaatan infrastruktur yang kurang optimal pula.

Rata-rata Lulusan SMK yang Melanjutkan Pekerjaan/Berwirausaha dan Perolehan Pendapatannya (%)¹



Sumber:
¹ Kemendikbudristek, 2024
² PDDikti Kemendikbudristek, 2022

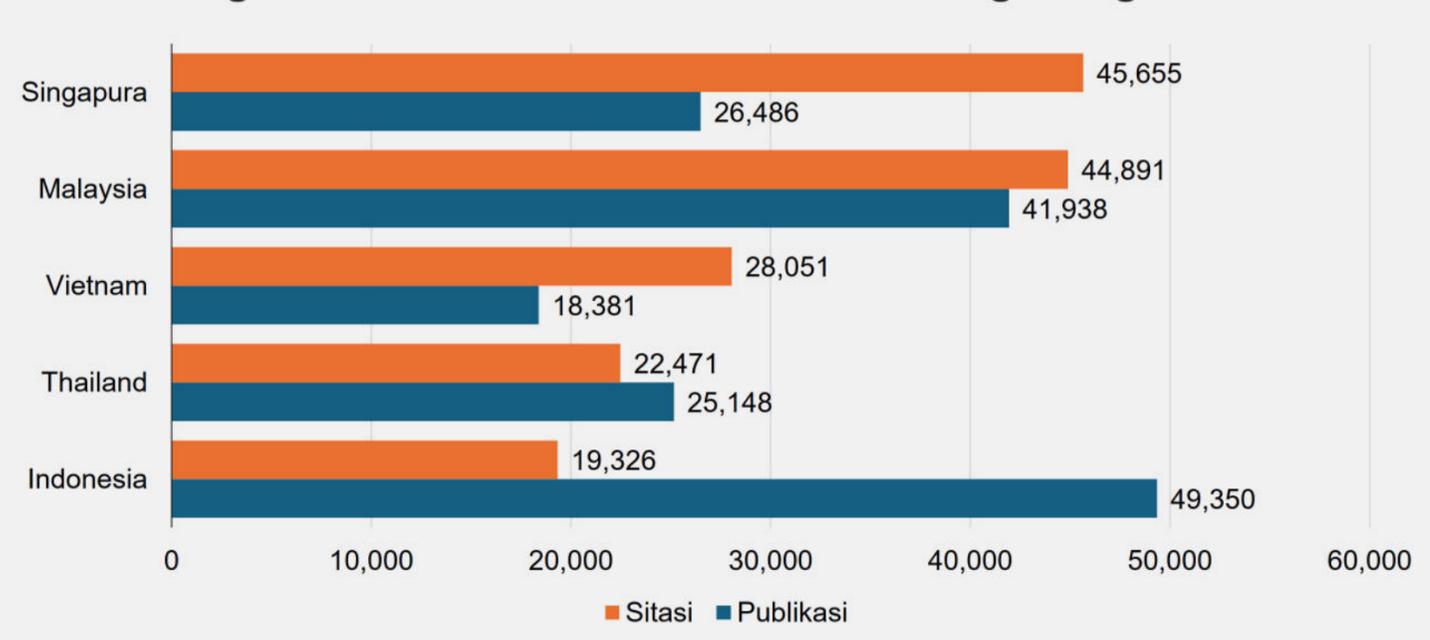
Potret Kualifikasi Pendidikan Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi²



Belum Optimalnya Penciptaan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi di Perguruan Tinggi Berbasis Riset Ilmiah (Dasar dan Terapan)

- Perguruan tinggi berperan penting dalam menciptakan pengetahuan baru melalui riset ilmiah, baik dasar maupun terapan, namun kolaborasi riset di tingkat nasional dan internasional masih terkendala oleh kesenjangan kapasitas dan akses jaringan global.
- Kinerja publikasi ilmiah di dunia academia PT meningkat dalam kuantitas, tetapi kualitas dan dampaknya masih terbatas, tercermin dari rendahnya rasio sitasi.
- Potensi penciptaan kekayaan intelektual di perguruan tinggi Indonesia belum optimal.

Perbandingan Jumlah Publikasi dan Sitasi Berbagai Negara³



Sumber:

³ Scimagojr 2021

⁴ Human Development Report 2021, World Bank 2012-2020, WIPO 2022, WEF 2019, Scimago Journal by Scopus 2021, QS World University Rankings 2023, UNESCO 2016-2020

Masih Rendahnya Daya Saing Pendidikan Tinggi dan Iptek di Tingkat Global

- Posisi daya saing Indonesia masih tertinggal, yang ditunjukkan oleh capaian berbagai indikator global.
- Konsorsium riset nasional, seperti Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dan Konsorsium Riset Pangan dan Pertanian, menunjukkan perkembangan positif, namun masih menghadapi kendala infrastruktur, keterbatasan SDM, dan tata kelola pendanaan yang kurang optimal.
- Perlunya keterlibatan aktif Indonesia dalam ratifikasi konvensi global tentang pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi guna meningkatkan daya saing internasional, memfasilitasi mobilitas akademik, dan mendorong kerja sama internasional.

No.	Indikator Internasional	Indonesia	India	Viet Nam	Thailand	Malaysia	China	Singapore
1	Human Development Index	0,71	0,63	0,7	0,8	0,8	0,77	0,94
2	Human Capital Index	0,54	0,49	0,69	0,61	0,61	0,65	0,88
3	Global Innovation Index	0,71	0,63	0,7	0,8	0,8	0,77	0,94
4	Global Competitiveness Index	64,6	61,4	61,5	68,1	74,6	73,9	84,8
5	Citation/Publication Ratio	0,39	0,85	1,53	0,89	1,07	0,96	1,72
6	Enrollment in Tertiary Edu (number)	7.108.690	31.801.054	2.323.935	2.419.858	1.214.016	41.488.905	210.784
7	Gross Enrollment in Tertiary Edu (%)	33,4	26,4	27,89	50	42,56	43,89	85,87
8	Graduated in STEM (%)	18,47	31,41	23,38	27,31	37,19	-	34,3
9	Number of Institutions in QS WUR Top 1 until >1000	16	41	5	10	24	71	3
10	Inbound Mobility Rate (%)	0,1	0,12	0,33	1,31	7,89	0,39	25,25

Perlunya penguatan tata kelola untuk pendidik dan tenaga kependidikan

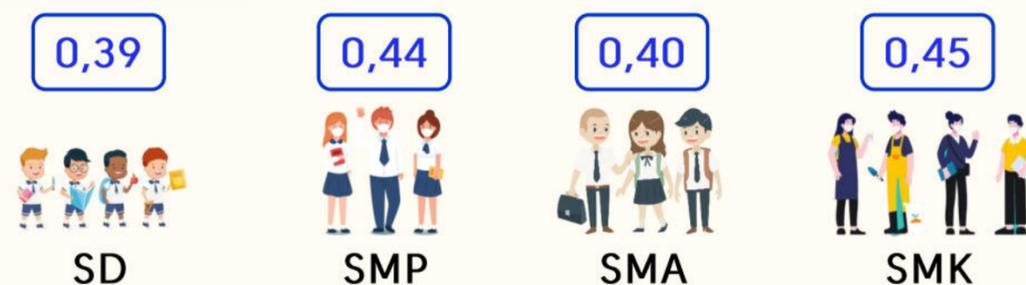
Distribusi guru belum merata

- Angka kecukupan guru di SD, SMP, SMA, dan SMK masih rendah, antara 0,6 hingga 0,7.
- Distribusi guru juga belum merata, terutama di SMP hingga SMK.
- Sekitar 60 ribu guru pensiun setiap tahun, diperlukan perencanaan untuk pengangkatan guru baru berstatus ASN yang memenuhi syarat.

Proyeksi Jumlah Guru Pensiun 2022-2030¹



Indeks Pemerataan Guru



Penyelenggaraan pendidikan calon guru melalui LPTK dan PPG belum optimal

- Ketidaksinkronan kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan kebutuhan pendidikan, terutama dalam kemampuan digital dan pedagogi berpusat pada siswa, menghambat efektivitas dan inovasi.
- LPTK juga belum siap dari segi infrastruktur, fasilitas, dan kualitas dosen dalam penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara efektif.
- Kesenjangan akses terhadap program PPG menciptakan ketimpangan dalam peningkatan kompetensi calon guru.

Mekanisme rekrutmen dan pengembangan profesional pendidik belum efektif dan berkelanjutan

- Partisipasi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk mengikuti peningkatan kompetensi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, masih tergolong rendah yaitu baru 52,69 persen pada tahun 2023².
- Pengembangan profesional pendidik belum efektif karena materi pelatihan sering tidak sesuai dengan kebutuhan guru, yang memerlukan pelatihan lebih fokus pada penguasaan materi pelajaran dan keterampilan pedagogis³.
- Untuk itu, upaya peningkatan kompetensi guru dan pendidik secara berkelanjutan harus menjadi prioritas pada arah kebijakan ke depan.

Sumber:

¹ Ditjen GTK, Kemendikbudristek 2023

² Laporan Kinerja Kemendikbudristek, 2023

³ Revina et al. (2020). Systemic Constraints Facing Teacher professional Development in a Middle-Income Country: Indonesia's Experience Over Four Decades. RISE Working Paper Series. 20/054. https://doi.org/10.35489/BSGRISEWP_2020/054.

Kualitas tata kelola pendidikan belum optimal

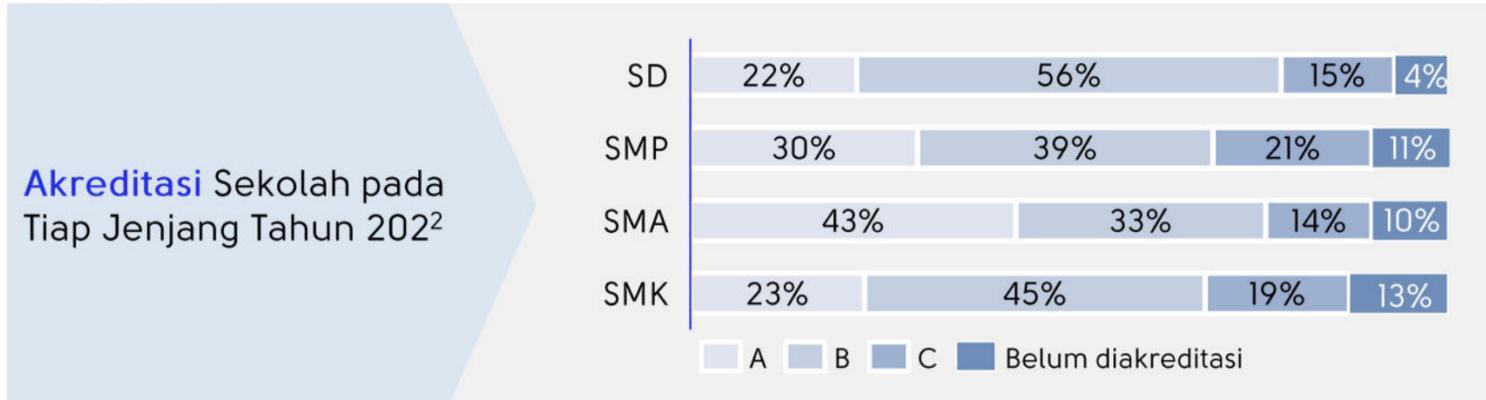
Kurangnya kapasitas kepala satuan pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran

Tata kelola pendidikan yang baik berdampak pada pencapaian tujuan. Namun, banyak satuan pendidikan belum memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini mengindikasikan kurangnya peran kepala satuan pendidikan dalam kemajuan proses pengajaran dan pembelajaran.



Tata kelola lintas penjaminan mutu belum optimal

Lebih dari 19% satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) memiliki akreditasi C atau belum diakreditasi.



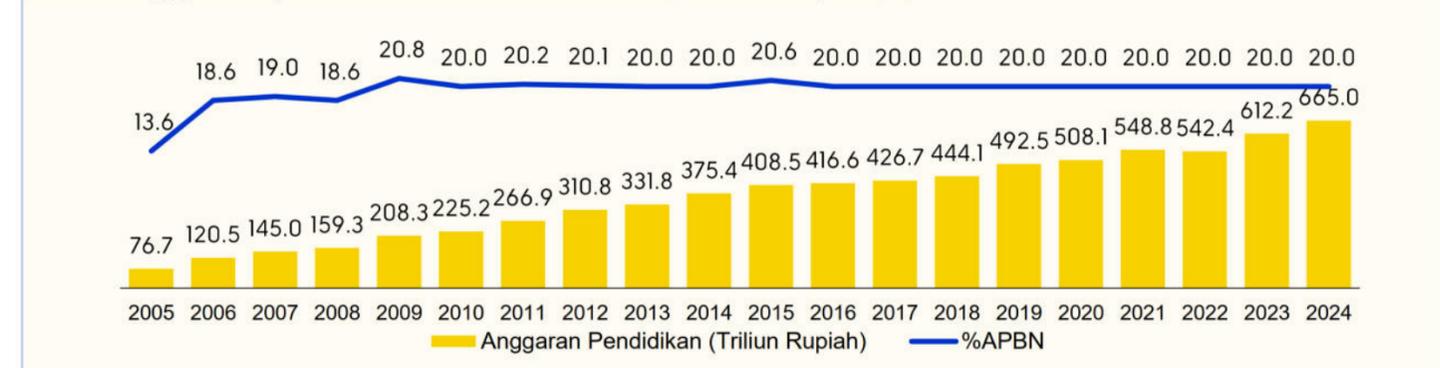
Disparitas kebijakan pemimpin daerah dalam menentukan prioritas kebijakan

- Kesenjangan partisipasi dan kualitas pendidikan, serta hasil pembelajaran terjadi antara lain dipengaruhi oleh pilihan prioritas dan kebijakan pemimpin daerah. Pilihan prioritas pemimpin daerah dalam pemanfaatan anggaran akan berdampak pada ketersediaan investasi untuk sarpras pendidikan maupun penyediaan guru yang kompeten.
- Selain itu, desentralisasi kewenangan pemerintah daerah berpengaruh pada terhambatnya mobilitas pendidik dari/ke daerah atau sekolah yang kekurangan/kelebihan guru, sehingga menyebabkan sulitnya pemerataan distribusi guru

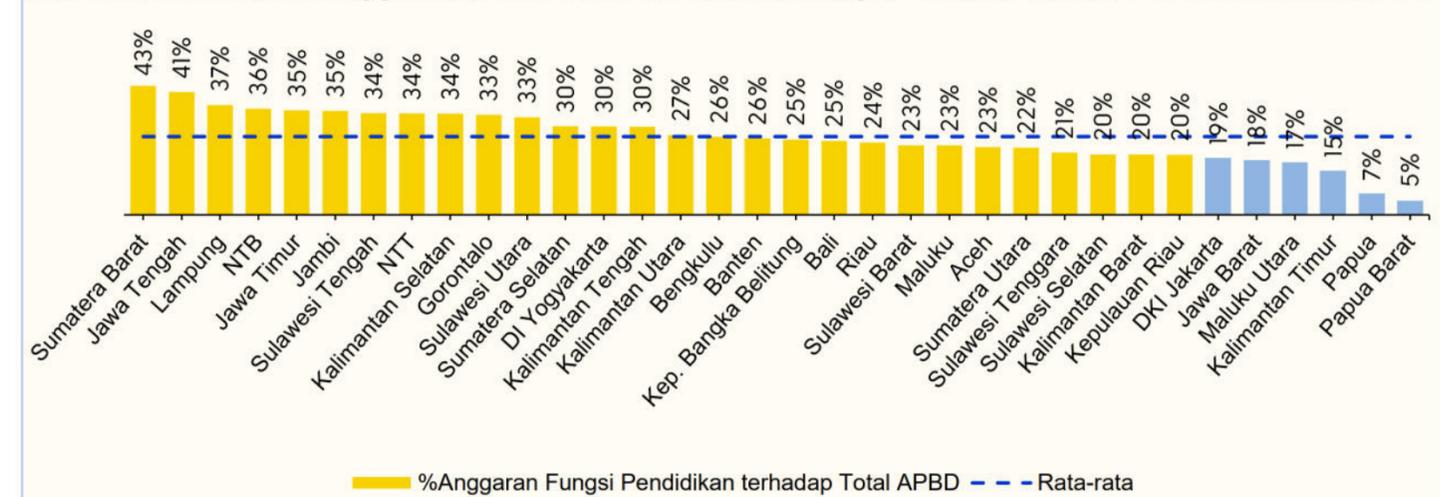
Kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan masih rendah

- Porsi anggaran pendidikan dalam APBN untuk daerah meningkat setiap tahun. Selama 2015-2019, lebih dari 60% APBN pendidikan dialokasikan untuk daerah³.
- Pada APBN 2024, anggaran pendidikan melalui transfer daerah sebesar 346,6T, meningkat dari 305,6 T pada 2023.
- Namun, belum semua Pemerintah Daerah memenuhi mandat anggaran pendidikan 20%.

Tren anggaran pendidikan dalam APBN (triliun rupiah)⁴



Persentase Alokasi Anggaran pendidikan di Daerah dengan Dana Transfer Daerah Tahun 2021⁵



Sumber:

- Kemendikbudristek, 2024
- Neraca Pendidikan Daerah untuk Nasional, Kemendikbudristek, 2023
- Renstra Kemendikbudristek 2020-2024
- UU APBN dan Perpres Rincian APBN, 2005-2024
- Kemendikbudristek dalam Publikasi Neraca Pendidikan Daerah, 2021



Kementerian PPN/
Bappenas



Photo credit: @Edi Purnomo/INOVASI

Daftar Isi

- Sistematika Penulisan
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Analisis Situasi dan Isu Strategis
- **Bab III Kerangka Pikir**
- Bab IV Sasaran Pendidikan 2045
- Bab V Arah Kebijakan
- Bab VI Kaidah Pelaksanaan
- Bab VII Mekanisme Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN



- Pendidikan bertujuan untuk membangun peradaban bangsa dengan mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik sebagai landasan membentuk masyarakat yang demokratis dan berkeadaban
- Pembangunan pendidikan bertumpu pada 4 pilar utama.
 - **Pilar Akses Pendidikan yang Berkeadilan** untuk memastikan semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
 - **Pilar Mutu Pendidikan yang Holistik dan Kontekstual** untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.
 - **Pilar Relevansi Pendidikan dengan Tujuan Pembangunan Nasional** untuk mempersiapkan lulusan mampu bersaing dalam dunia kerja dan perkembangan teknologi.
 - **Pilar Tata Kelola Pendidikan yang Partisipatif dan Akuntabel** untuk menciptakan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
- Pembangunan pendidikan juga perlu didukung kerangka kelembagaan, regulasi, dan pendanaan. Selain itu, perlu diperkuat reformasi reformasi birokrasi dan koordinasi lintas sektoral, serta kolaborasi para pemangku kepentingan.



Daftar Isi

- Sistematika Penulisan
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Analisis Situasi dan Isu Strategis
- Bab III Kerangka Pikir
- **Bab IV Sasaran Pendidikan 2045**
- Bab V Arah Kebijakan
- Bab VI Faktor Pendukung (*Enabling Factor*)
- Bab VII Mekanisme Penyelenggaraan

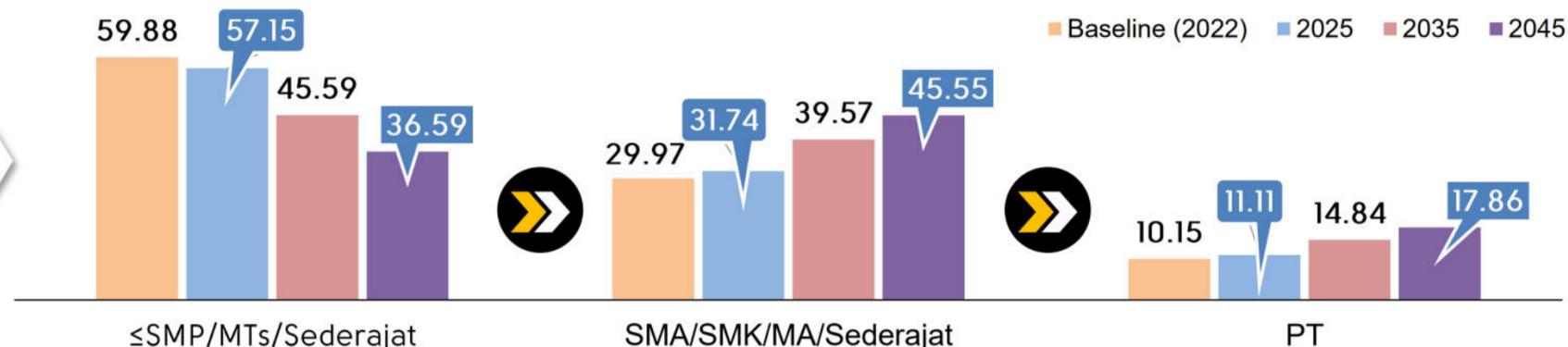
SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2045

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Investasi pendidikan perlu fokus pada pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan relevansi, sehingga taraf pendidikan penduduk makin meningkat yang menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Proyeksi Kualifikasi Pendidikan SDM

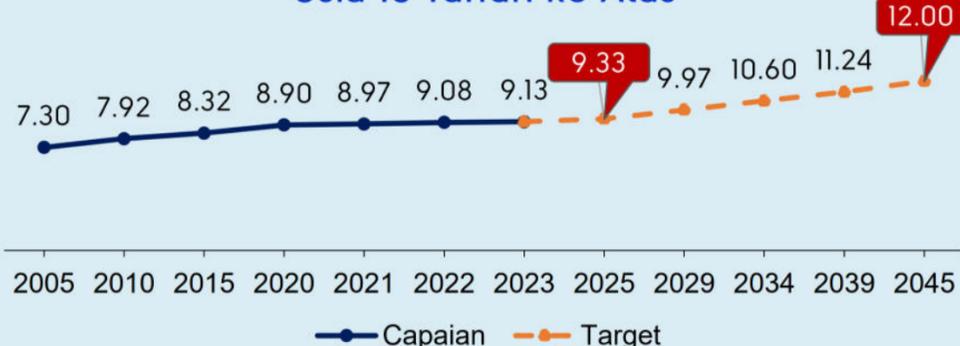


Indikator Sasaran Pembangunan Pendidikan

Rata-rata Nilai PISA



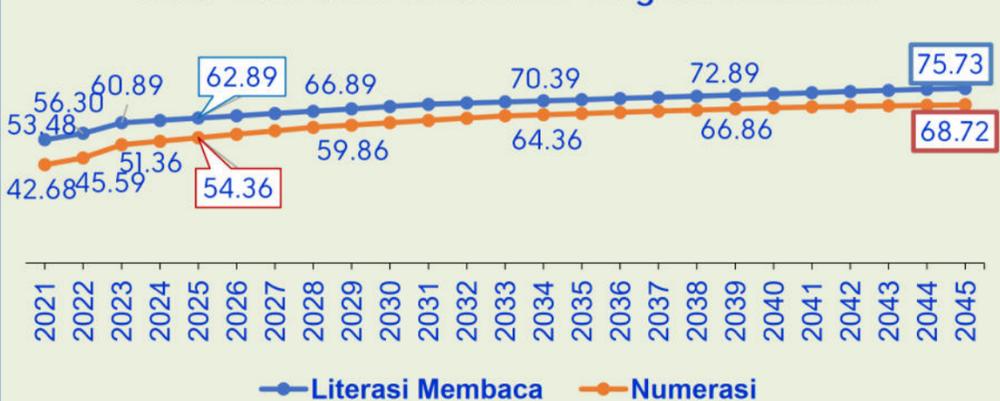
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas



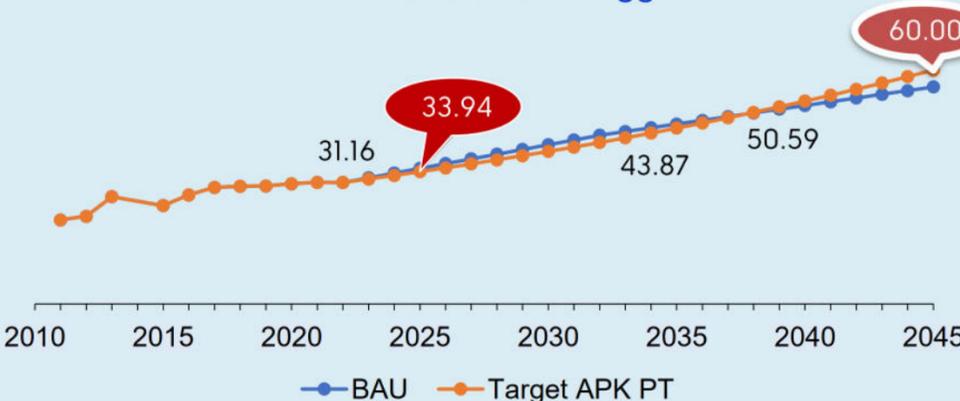
Harapan Lama Sekolah



Rata-rata Skor Asesmen Tingkat Nasional



APK Pendidikan Tinggi



Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi





Kementerian PPN/
Bappenas



Photo credit: @Edi Purnomo/INOVASI

Daftar Isi

- Sistematika Penulisan
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Analisis Situasi dan Isu Strategis
- Bab III Kerangka Pikir
- Bab IV Sasaran Pendidikan 2045
- **Bab V Arah Kebijakan**
- Bab VI Kaidah Pelaksanaan
- Bab VII Mekanisme Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan

Muatan Arah Kebijakan dalam Peta Jalan Pendidikan

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)

1. Perluasan dan penguatan kualitas layanan PAUD 1 tahun pendidikan prasekolah
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
3. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
4. Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
5. Revitalisasi pendidikan nonformal
6. Akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dalam percepatan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun
7. Pemanfaatan kerangka penjaminan mutu untuk penyediaan layanan Pendidikan berkualitas

Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

1. Penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan
2. Penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
3. Penyediaan sistem informasi data pendidikan
4. Penguatan sistem penjaminan mutu
5. Penguatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan

Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas

1. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antar daerah, memenuhi kebutuhan guru dan penggantian guru pensiun
2. Reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3. Penguatan ekosistem pendampingan bagi pengembangan profesional berkelanjutan

Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM

1. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas
2. Penguatan kualitas infrastruktur perguruan tinggi
3. Pengembangan Pembelajaran Berbasis STEAM dan Program Studi STEAM
4. Peningkatan kualitas dan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan tinggi
5. Penguatan kualitas tata Kelola pendidikan tinggi

Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

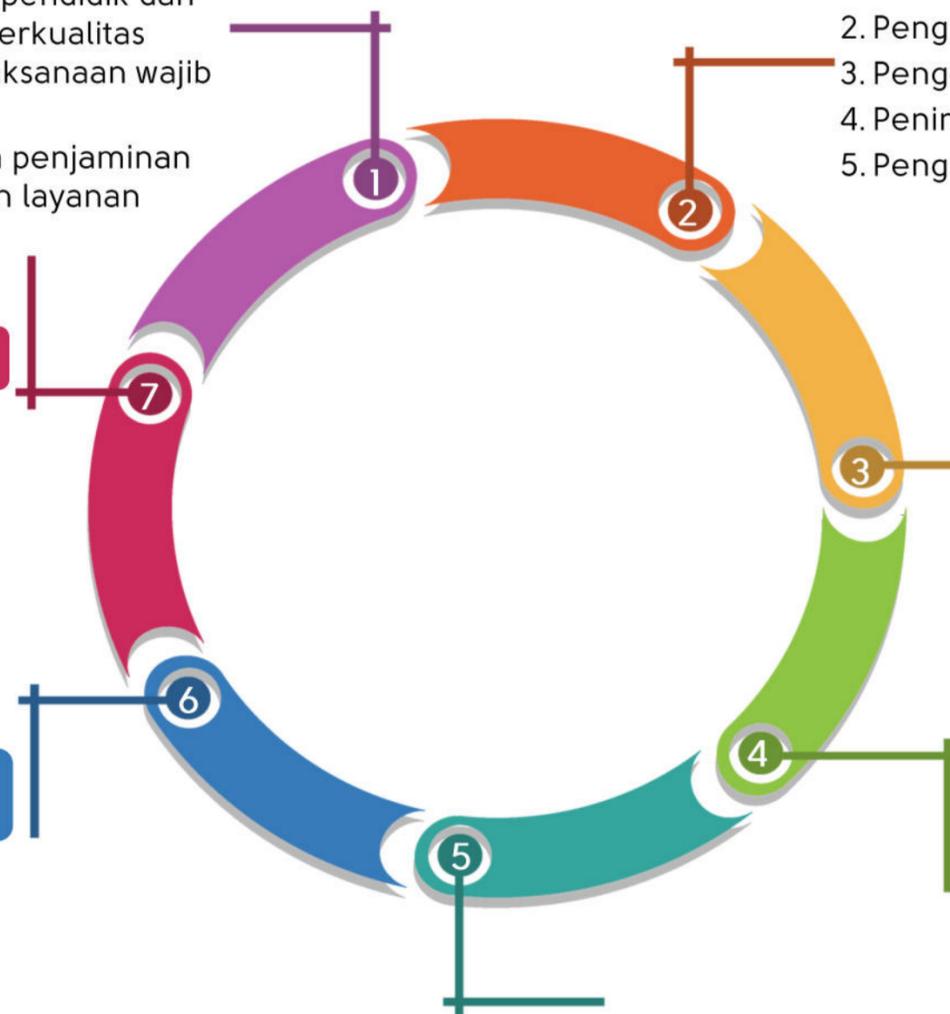
1. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern
2. Pemantapan sistem asesmen komprehensif
3. Penciptaan ekosistem lingkungan belajar yang mendukung penguatan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik
4. Penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi fondasional, kontekstual dan berpusat pada kebutuhan peserta didik
5. Pengembangan anak usia dini holistik-integratif (PAUD-HI)
6. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa

Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas

1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
2. Penguatan kualitas dan rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
3. Peningkatan jaminan mutu layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan

Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja

1. Penguatan layanan pendidikan vokasi
2. Penguatan infrastruktur esensial pendidikan vokasi
3. Penguatan pembelajaran pendidikan vokasi
4. Penguatan SDM pendidikan vokasi
5. Penguatan pendidikan tinggi sebagai pencipta dan pengembang ilmu pengetahuan berbasis riset ilmiah (dasar dan terapan)
6. Penguatan produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi



Isu

	Rendahnya akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)	→	Perluasan dan Penguatan Layanan PAUD 1 Tahun Pendidikan Prasekolah
	Kesenjangan partisipasi pendidikan terutama jenjang pendidikan menengah	→	Akselerasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas dalam Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun
	Masih maraknya masalah-masalah sosial yang menghambat anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan secara berkualitas	→	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
	Dukungan infrastruktur dan bantuan pendidikan belum optimal	→	Pemanfaatan Kerangka Penjaminan Mutu untuk Penyediaan Layanan Pendidikan Berkualitas
		→	Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran
		→	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas
	Belum optimalnya jalur pendidikan nonformal sebagai alternatif pembelajaran	→	Revitalisasi Pendidikan Nonformal

Arah Kebijakan (1/2)

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)					
Indikator:					
1. Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	66,79	69,71	71,89	73,62	75,33
2. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	64,79	68,87	72,41	75,96	80,21
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA/BA)	36,36	44,48	51,05	57,62	65,51
4. APK Penyandang Disabilitas					
a. SMP/MTs/Sederajat	64,04	74,56	76,26	77,58	78,84
b. SMA/SMK/MA/Sederajat	57,14	62,70	67,85	71,22	74,53
5. Rasio APK SMA/MA/SMK/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0,78	0,83	0,86	0,88	0,90
Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan				
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045	
Strategi 1: Perluasan dan Penguatan Kualitas Layanan PAUD 1 Tahun Pendidikan Prasekolah					
1. Pengembangan layanan Satu Atap (Satap) PAUD-SD bagi desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD					
2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD di daerah yang tidak memungkinkan pembangunan Satap PAUD-SD					
3. Penataan kelembagaan menjadi 1 jenis satuan PAUD untuk penyediaan multi layanan pendidikan anak usia dini yang terorganisasi (<i>single license</i>)					
4. Pengembangan sistem pendataan serta penjangkauan dan pendampingan yang efektif bagi anak usia 5-6 tahun untuk mendapatkan layanan PAUD					
5. Peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya PAUD					
Strategi 2: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas					
1. Pembangunan satuan pendidikan baru di wilayah yang butuh di afirmasi					
2. Revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan					
3. Penyediaan sarana pembelajaran sesuai standar layanan yang ditentukan					
4. Penyediaan sarana dan prasarana Satap PAUD-SD					
5. Penjaminan kualitas setiap satuan pendidikan memenuhi standar sekolah inklusi					

Arah Kebijakan (2/2)

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)

Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah serta 12 Tahun Pendidikan Dasar & Menengah)				
Strategi 3: Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran				
1. Pemberian bantuan afirmasi bagi peserta didik				
2. Pemberian bantuan operasional kepada satuan pendidikan				
3. Pemberian beasiswa prestasi akademik dan non akademik				
Strategi 4: Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)				
1. Pengembangan sistem pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)				
2. Implementasi strategi penjangkauan, pengembalian dan pendampingan Anak Tidak Sekolah (ATS)				
3. Penguatan layanan pendidikan dan satuan pendidikan untuk pencegahan anak tidak sekolah (ATS)				
4. Peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya pendidikan				
Strategi 5: Revitalisasi Pendidikan Nonformal				
1. Pemenuhan standar untuk merekognisi lulusan pendidikan nonformal				
2. Penjaminan satuan mutu pendidikan nonformal berkualitas				
Strategi 6: Akselerasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas dalam Percepatan Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun				
1. Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD (termasuk dalam pelaksanaan Satap PAUD-SD)				
2. Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah				
Strategi 7: Pemanfaatan Kerangka Penjaminan Mutu untuk Penyediaan Layanan Pendidikan Berkualitas				
1. Penjaminan mutu pada jenjang PAUD				
2. Penjaminan satuan pendidikan non formal berkualitas				

Isu



Masih rendahnya partisipasi masyarakat ke jenjang pendidikan tinggi berkualitas



Belum meratanya kapasitas dan kualitas infrastruktur esensial pendidikan tinggi



Belum berkembangnya pembelajaran STEAM dan perlunya proporsionalitas bidang ilmu STEAM di perguruan tinggi



Masih belum meratanya kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi



Belum optimalnya kualitas pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan tinggi



02

Program Pembangunan Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM

Strategi

Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi Berkualitas

Pengembangan Infrastruktur Perguruan Tinggi yang berkualitas

Pengembangan Pembelajaran Berbasis STEAM dan Program Studi STEAM

Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi

Penguatan Kualitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM					
Indikator					
1. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	10,12	10,79	11,13	11,39	11,63
2. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	31,45	38,04	43,87	50,59	60,00
3. Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)	0,33	0,58	0,73	0,88	1,00
Strategi/Fokus Pelaksanaan		Tahap Pelaksanaan			
		2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Strategi 1: Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas					
1. Pengembangan dan perluasan kebijakan afirmasi, bantuan, subsidi, dan skema pembiayaan pendidikan tinggi yang berkeadilan untuk mendukung tingkat keberlanjutan pendidikan masyarakat ke pendidikan tinggi.					
2. Perluasan layanan pendidikan tinggi berkualitas (pendidikan jarak jauh, blended learning, kredensial mikro, gap year, maupun rekognisi pembelajaran lampau) untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat.					
3. Pengembangan dan pengimplementasian skema pembiayaan pendidikan tinggi berbasis kemitraan dengan sektor swasta, filantropi, serta lembaga nasional dan internasional untuk memperluas akses masyarakat ke pendidikan tinggi.					
Strategi 2: Penguatan Infrastruktur Perguruan Tinggi					
1. Penguatan prasarana dan sarana pembelajaran esensial yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi di daerah afirmasi.					
2. Penguatan infrastruktur dan teknologi esensial pembelajaran untuk mendukung perluasan layanan pendidikan tinggi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.					
3. Pengembangan diversifikasi sumber pendanaan inovatif pendidikan tinggi, termasuk mobilisasi dana dari pemerintah daerah, industri, dan kerja sama internasional.					
4. Peningkatan kolaborasi nasional dan internasional dalam mengimplementasikan praktik terbaik pendidikan tinggi dan transfer teknologi untuk mengembangkan layanan pendidikan tinggi inovatif.					
Strategi 3: Pengembangan Pembelajaran Berbasis STEAM dan Program Studi STEAM					
1. Pengembangan program studi dan pendekatan pembelajaran multidisiplin dan interdisiplin yang aplikatif, adaptif, kolaboratif dan inovatif sesuai dengan perkembangan keilmuan nasional dan global.					
2. Peningkatan kolaborasi antar-disiplin maupun pendekatan STEAM melalui pembelajaran dan proyek lintas fakultas yang melibatkan dosen dan mahasiswa.					
3. Penguatan dan pemanfaatan data supply and demand bagi perguruan tinggi untuk penyesuaian, penataan (pembukaan dan penutupan), serta mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.					
4. Penguatan dan pemanfaatan data pembangunan daerah bagi perguruan tinggi untuk menyelaraskan prioritas program penelitian dan pengabdian masyarakat.					

Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM				
Strategi 4: Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi				
1. Reformasi tata kelola (rekrutmen, administrasi, kinerja) serta pengembangan karier dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan.				
2. Peningkatan akses dosen kepada pendidikan gelar lanjutan (S3/doktoral) khususnya bagi dosen di perguruan tinggi daerah afirmasi.				
3. Perluasan akses dan sasaran program peningkatan kompetensi dosen (pelatihan, magang, dan World Class Professor) yang relevan dengan bidang keahlian dosen.				
4. Pengimplementasian program pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen dan tenaga pendidik untuk meningkatkan penguasaan teknologi.				
5. Pengembangan program sertifikasi profesi dosen yang selaras dengan kualifikasi nasional dan internasional.				
6. Penguatan kerja sama nasional dan internasional dosen terkait inovasi berkelanjutan dalam metode pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.				
Strategi 5: Penguatan Kualitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi				
1. Penguatan penerapan kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi dan layanan pendidikan tinggi kepada seluruh perguruan tinggi.				
2. Peningkatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan di perguruan tinggi melalui program pelatihan, sertifikasi, serta penerapan manajemen perguruan tinggi yang inovatif.				
3. Penguatan akreditasi nasional dan internasional bagi perguruan tinggi dan program studi.				
4. Penerapan dan penguatan kebijakan diferensiasi misi perguruan tinggi yang sesuai dengan keunggulan perguruan tinggi, wilayah, dan sektor prioritas.				
5. Perluasan penerapan standar perguruan tinggi berkualitas yang inklusif, sehat, aman, dan nyaman.				
6. Perluasan jumlah perguruan tinggi yang memiliki unit layanan yang mendukung perguruan tinggi berkualitas yang inklusif, sehat, aman, dan nyaman.				
7. Peningkatan kolaborasi nasional dan internasional dalam inovasi program pendidikan tinggi yang inklusif, sehat, aman, dan nyaman.				

Isu



Capaian peserta didik pada kompetensi esensial dan kualitas pembelajaran yang belum optimal



Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern



Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Fondasional, Kontekstual, dan Berpusat pada Kebutuhan Peserta Didik



Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif



Perlunya koordinasi lebih sistematis dalam menjaga tumbuh kembang anak usia dini agar optimal



Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)



Iklim lingkungan belajar yang belum sepenuhnya mendukung kesejahteraan psikologis warga satuan pendidikan



Penciptaan Ekosistem Lingkungan Belajar yang Mendukung Penguatan Karakter dan *Wellbeing* Peserta Didik dan Pendidik



Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Arah Kebijakan (1/3)

Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
Indikator:					
1. Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimum dalam asesmen tingkat nasional					
a. Literasi Membaca	66,27	72,80	76,61	79,33	82,42
b. Numerasi	60,36	70,35	75,64	78,58	80,76
2. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik, yang meliputi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; bergotong-royong; kreatif; bernalar kritis; mandiri; dan berkebinekaan global	74,50	81,18	86,75	92,32	99,00
3. Persentase satuan pendidikan dengan kategori baik pada indikator					
a. Iklim keamanan sekolah;	89,98	92,58	94,74	96,90	99,50
b. Iklim Inklusivitas;	52,92	58,94	63,96	68,98	75,00
c. Iklim Kebhinekaan	81,10	85,98	90,05	94,12	99,00
4. Persentase anak yang mencapai tahap perkembangan yang optimal berdasarkan <i>Early Childhood Development Index</i> (ECDI)	87,75				
Strategi/Fokus Pelaksanaan		Tahap Pelaksanaan			
		2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Strategi I: Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Fondasional, Kontekstual, dan Berpusat pada Kebutuhan Peserta Didik					
1. Penguatan sistem pendukung untuk penerapan pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik					
2. Penguatan dukungan sistemik untuk pembelajaran bahasa asing yang mendukung penguasaan keterampilan abad 21 sejak SD/MI/Sederajat.					
3. Pemanfaatan hasil seleksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah					
4. Penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan untuk memperkuat jati diri bangsa dalam pergaulan dunia					
5. Penguatan skema pemilihan muatan pembelajaran pilihan pada pendidikan menengah untuk memfasilitasi minat, bakat dan kemampuan peserta didik.					
6. Penguatan penguasaan keterampilan vokasional dan kewirausahaan bersertifikasi pada peserta didik jenjang pendidikan menengah					

Arah Kebijakan (2/3)

Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				
Strategi 2: Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern				
1. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran di setiap satuan pendidikan melalui dukungan asimetris dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait.				
2. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.				
3. Pengembangan kebijakan yang memberikan keleluasaan untuk menerapkan inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar peserta didik				
4. Penguatan penerapan penyelarasan pembelajaran PAUD dan SD/MI kelas awal untuk mendukung kemudahan peserta didik bertransisi dari PAUD ke jenjang pendidikan dasar				
5. Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.				
6. Pengembangan model-model pembelajaran yang relevan, seperti menggunakan pendekatan proyek untuk pendidikan / pengembangan karakter				
Strategi 3: Pemanjangan Sistem Asesmen Komprehensif				
1. Penguatan rancangan asesmen tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar.				
2. Penguatan pemanfaatan hasil asesmen tingkat nasional sebagai umpan balik kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Pemerintah untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan yang adil dan merata.				
3. Penguatan seleksi masuk perguruan tinggi yang mendorong pembelajaran holistic dan esensial di jenjang pendidikan sebelumnya				
Strategi 4: Penciptaan Ekosistem Lingkungan Belajar yang Mendukung Penguatan Karakter dan <i>Wellbeing</i> Peserta Didik dan Pendidik				
1. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan <i>wellbeing</i> peserta didik dan pendidik				
2. Penguatan sistem layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental untuk peserta didik dan pendidik dengan melibatkan ekosistem.				
3. Penguatan skema konvergensi antara peran dan dukungan lintas KL yang mendukung peningkatan iklim lingkungan belajar yang aman dan sehat secara fisik dan mental bagi warga satuan pendidikan				
4. Penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan nonfinansial				
5. Pemanfaatan temuan dari asesmen berskala nasional untuk meningkatkan iklim keamanan sekolah				

Arah Kebijakan (3/3)

Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran



Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				
Strategi 5: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)				
1. Penguatan koordinasi dan pembagian peran antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi skema PAUD-HI yang berkonvergensi dengan berbagai program yang menyasar anak usia dini				
2. Integrasi dan pemanfaatan data lintas bidang dalam rangka monitoring pencapaian tujuan kebijakan PAUD-HI				
3. Penguatan kapasitas pemangku kepentingan (termasuk guru) di daerah dalam menyediakan layanan yang holistik-integratif bagi anak usia dini				
Strategi 6: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa				
1. Penyediaan dan pemerataan pendidik agama dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh Pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkualitas, sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta didik.				
2. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan penguatan mekanisme dalam pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh Pendidikan agama yang berkualitas sesuai dengan agama peserta didik				

Isu

 Perlunya penguatan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan



 Masih lemahnya rekognisi pendidik dan lulusan pendidikan pesantren



 Perlunya peningkatan penjaminan mutu layanan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan



Program Pembangunan **04** Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas

Strategi

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Peningkatan Kualitas dan Rekognisi Lulusan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Peningkatan Jaminan Mutu Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas					
Indikator:					
1. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	90	92	94	95	96
2. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid (setara B)	11,6	16,6	21	26	31
Strategi/Fokus Pelaksanaan		Tahap Pelaksanaan			
		2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Strategi 1: Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan					
1. Pemberian bantuan afirmasi bagi peserta didik di satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan di daerah 3T, dari kelompok marginal atau memiliki kebutuhan khusus					
2. Pemberian bantuan operasional kepada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan					
3. Revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan					
4. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan satuan pendidikan formal pesantren dan pendidikan keagamaan					
5. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan nonformal pesantren					
6. Pengembangan dan penerapan skema/layanan rekognisi pembelajaran lampau bagi pendidik di satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan					
Strategi 2: Penguatan Kualitas dan Rekognisi Lulusan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan					
1. Pengembangan skema perpindahan peserta didik antarjenis dan/atau antarjalur pendidikan					
2. Penyetaraan kualifikasi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum yang setara					
3. Pengembangan dan penerapan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren yang selaras dengan pendidikan umum					
4. Pengembangan skema rekognisi ijazah bagi lulusan pendidikan nonformal pesantren dan pendidikan keagamaan berjenjang					
5. Advokasi kepada Dudika dalam pengakuan kesetaraan lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan					
Strategi 3: Penguatan Penjaminan Mutu Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan					
1. Pengembangan kurikulum dan model pembelajaran yang esensial, adaptif, kontekstual, inklusif, moderat, dan berwawasan kebangsaan					
2. Penguatan asesmen satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan					
3. Pengembangan sistem informasi data pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang terintegrasi					

Isu

Program Pembangunan 05 Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja

Strategi



Pendidikan vokasi yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri



Penguatan Layanan Pendidikan Vokasi



Penguatan Pembelajaran Pendidikan Vokasi



Pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang kurang produktif



Penguatan Infrastruktur Esensial Pendidikan Vokasi



Penguatan SDM Pendidikan Vokasi



Belum optimalnya penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di pendidikan tinggi berbasis riset ilmiah (dasar dan terapan)



Penguatan Pendidikan Tinggi sebagai Pencipta dan Pengembang Ilmu Pengetahuan Berbasis Riset Ilmiah (Dasar dan Terapan)



Belum optimalnya peran perguruan tinggi sebagai pengembangan ilmiah dan produksi pengetahuan



Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

Arah Kebijakan (1/3)

Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Kemampuan Kerja

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja					
Indikator:					
1. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	66,30	67,66	71,26	73,22	75,00
2. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	41,86	47,00	53,05	59,10	66,37
Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan				
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045	
Strategi 1: Penguatan Layanan Pendidikan Vokasi					
1. Perluasan dan penguatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan industri, lembaga sertifikasi, dan asosiasi profesi untuk memastikan keterlibatan aktif dalam desain, pelaksanaan, dan standar program pembelajaran.					
2. Perluasan akses peserta didik terhadap program sertifikasi dengan bekerja sama dengan asosiasi profesi dan industri untuk menyediakan lebih banyak opsi sertifikasi sesuai kebutuhan Dudika.					
3. Pengembangan dan penguatan pelaksanaan <i>multi-entry multi-exit</i> dan <i>stackable credential</i> yang dapat di rekognisi oleh pendidikan vokasi dan Dudika, baik lingkup nasional dan internasional, untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat.					
4. Penguatan kerja sama nasional dan internasional bagi satuan pendidikan vokasi dalam mengembangkan riset terapan untuk inovasi berkelanjutan.					
Strategi 2: Penguatan Infrastruktur Esensial Pendidikan Vokasi					
1. Penguatan infrastruktur dan teknologi esensial pembelajaran satuan pendidikan vokasi yang selaras dengan perkembangan dan standar Dudika					
2. Pengembangan <i>teaching factory</i> sebagai media praktik peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangan Dudikia					
3. Pengembangan skema pembiayaan alternatif bersama Dudika dalam perluasan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi bagi peserta didik.					
4. Pengintegrasian teknologi mutakhir pendukung pendidikan vokasi untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.					

Arah Kebijakan (2/3)

Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Kemampuan Kerja



Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja				
Strategi 3: Penguatan Pembelajaran Pendidikan Vokasi				
1. Penguatan keterampilan dasar literasi, numerasi, dan keterampilan vokasional serta karakter untuk mempersiapkan peserta didik pendidikan vokasi menjadi pembelajar sepanjang hayat.				
2. Peningkatan kolaborasi dengan Dudika sebagai wahana pembelajaran satuan pendidikan vokasi.				
3. Penguatan skema pemagangan bagi peserta didik dan pendidik pendidikan vokasi.				
4. Penyelarasan konsentrasi keahlian pada satuan pendidikan vokasi dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA secara berkelanjutan.				
5. Penguatan pelaksanaan program dan optimalisasi pemanfaatan data tracer study pendidikan vokasi yang reliabel, komprehensif, dan berkala.				
6. Penguatan skema dan implementasi program praktisi mengajar (nasional dan internasional) di satuan pendidikan vokasi nasional.				
7. Penyelarasan dan pengintegrasian standar sertifikasi yang diakui secara internasional dan menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi global untuk meningkatkan pengakuan internasional atas sertifikat kompetensi lulusan vokasi Indonesia.				
Strategi 4: Penguatan SDM Pendidikan Vokasi				
1. Peningkatan kapabilitas pendidik dan tenaga pendidik dalam pemanfaatan infrastruktur esensial pembelajaran pendidikan menengah vokasi.				
2. Peningkatan jumlah dosen vokasi berkualifikasi S3 melalui program beasiswa dan/atau skema pembiayaan alternatif berkeadilan, serta mengembangkan jalur pendidikan yang terintegrasi dengan pengalaman industri.				
3. Pengembangan standar kompetensi nasional bagi pendidik vokasi yang diakui oleh industri yang mencakup aspek pengajaran, dan pengalaman industri.				
4. Perluasan sasaran dan jumlah pendidik untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi industri yang diakui secara nasional dan internasional, meningkatkan relevansi pengajaran dengan kebutuhan industri.				
5. Penguatan kerja sama nasional dan internasional pendidik vokasi terkait inovasi berkelanjutan dalam metode pengajaran, riset terapan, dan pengabdian masyarakat.				

Arah Kebijakan (3/3)

Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Kemampuan Kerja



Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja				
Strategi 5: Penguatan Pendidikan Tinggi sebagai Pencipta dan Pengembang Ilmu Pengetahuan Berbasis Riset Ilmiah (Dasar dan Terapan)				
1. Pengembangan pelatihan manajemen riset untuk dosen dan tenaga asisten penelitian guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan riset di perguruan tinggi.				
2. Penguatan skema kebijakan pendaftaran, perlindungan, dan insentif bagi produk kekayaan intelektual hasil inovasi dosen dan mahasiswa				
3. Pengembangan skema pengelolaan dana riset dan pendanaan riset nasional dan internasional (hibah dan joint funding) yang berkelanjutan untuk mendukung kebebasan akademik dan mendorong produktivitas riset.				
4. Pengembangan infrastruktur digital untuk keterbukaan ilmu pengetahuan perguruan tinggi, termasuk mengintegrasikan repositori penelitian nasional dengan platform internasional.				
5. Pengembangan dan penguatan pusat keunggulan iptek, kolaborasi riset, pusat inkubasi inovasi, <i>technology transfer office</i> , maupun <i>science technopark</i> di perguruan tinggi yang fokus pada bidang-bidang strategis sesuai dengan prioritas riset nasional dan global serta kebutuhan industri.				
Strategi 6: Penguatan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi				
1. Penguatan kualitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan <i>transformative competencies</i> , <i>transferable skills</i> , <i>soft skills</i> , dan kemampuan berwirausaha ke dalam kurikulum dan pembelajaran.				
2. Penguatan kemitraan dengan Dudika dan pendampingan kepada peserta didik tingkat akhir untuk meningkatkan kebermanfaatan.				
3. Peningkatan kemitraan strategis perguruan tinggi dan keterlibatan dalam konsorsium riset nasional dan internasional dengan fokus pada isu-isu prioritas nasional dan global.				
4. Penguatan implementasi prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum, proyek-proyek penelitian, dan pengabdian masyarakat.				
5. Internasionalisasi pendidikan tinggi untuk memperkuat reputasi pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global serta berpartisipasi dalam ratifikasi konvensi global tentang kualifikasi pendidikan tinggi				
6. Peningkatan komersialisasi hasil riset dalam skala global, dengan dukungan dari jaringan distribusi internasional dan mitra industri multinasional.				

Isu

Program Pembangunan 06 Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas

Strategi



Distribusi guru yang belum merata dan penguatan mekanisme rekrutmen



Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru seperti formasi, rekrutmen, pengangkatan & penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (*in-service training*), kesejahteraan berbasis kinerja



Penyelenggaraan pendidikan calon guru melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) belum sepenuhnya optimal



Reformasi Pendidikan Keguruan dengan Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru



Pengembangan profesional pendidik belum efektif dan berkelanjutan



Penguatan Ekosistem Pendampingan bagi Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Arah Kebijakan 1/3

Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas



Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas					
Indikator:					
1. Indeks pemerataan guru	37,14	39,47	41,50	43,54	45,98
3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	35,21	51,28	64,67	78,06	94,13
Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan				
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045	
Strategi 1: Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru e.g formasi, rekrutmen, pengangkatan & penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (<i>in-service training</i>), kesejahteraan berbasis kinerja					
1. Pengembangan data guru secara terpadu termasuk proyeksi kebutuhan guru dan penyusunan sistem informasi tentang kebutuhan guru untuk calon guru dan pemangku kepentingan lainnya					
2. Pengembangan mekanisme rekrutmen guru ASN secara terpusat sesuai kebutuhan berbasis analisis beban kerja					
3. Penguatan peran pemerintah pusat dalam memastikan penempatan guru sesuai kebutuhan					
4. Pengangkatan guru satuan pendidikan formal berdasarkan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi					
5. Pengangkatan pendidik satuan pendidikan nonformal berdasarkan pelatihan kompetensi terstandar					
6. Penguatan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru melalui penyesuaian linearitas guru, termasuk penerapan multi-kelas dan multi-bidang, untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan SDM					
7. Pengembangan mekanisme rekrutmen dan remunerasi pendidik vokasi dari praktisi dunia kerja					

Arah Kebijakan 2/3

Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas



Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas				
Strategi 2: Reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK dan revitalisasi pendidikan profesi guru				
1. Penguatan kurikulum LPTK yang adaptif untuk membangun kompetensi guru dalam memfasilitasi pendidikan inklusif				
2. Pengintegrasian kurikulum LPTK dengan kurikulum di satuan pendidikan, termasuk konten pendidikan dan pengajaran inklusif				
3. Pengembangan kurikulum LPTK yang adaptif dan responsif untuk pengembangan kompetensi guru				
4. Penyelenggaraan program studi pendidikan keguruan yang diselaraskan dengan proyeksi kebutuhan tenaga pendidik				
5. Penguatan peran badan akreditasi nasional dan/atau lembaga akreditasi mandiri dalam penjaminan mutu program studi pendidikan di LPTK				
6. Penguatan kemitraan antara LPTK dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program induksi bagi guru pemula				
7. Pengembangan sistem <i>double major</i> (major-minor) dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)				
8. Pengembangan keterampilan spesifik calon guru melalui sertifikasi <i>double major</i>				
9. Pengintegrasian LPTK dengan program PPG untuk mengakomodasi sertifikasi <i>double major</i>				
10. Perluasan kerjasama LPTK nasional dengan LPTK internasional untuk mengembangkan dan menerapkan praktik terbaik dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran.				
11. Penguatan kompetensi pendidik dalam melaksanakan pelayanan PAUD-HI				

Arah Kebijakan 3/3

Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas



Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas				
Strategi 3: Penguatan Ekosistem Pendampingan Bagi Pengembangan Profesional Berkelanjutan				
1. Penguatan kapasitas unit pelaksana teknis terkait untuk pengembangan profesional berkelanjutan				
2. Penguatan peran Pemda untuk memfasilitasi proses belajar berkelanjutan melalui komunitas belajar di tingkat komunitas				
3. Peningkatan kompetensi guru berbasis pemanfaatan data asesmen di tingkat nasional				
4. Pemenuhan dan penguatan kompetensi tenaga kependidikan melalui jalur kualifikasi dan atau pelatihan terstandar				
5. Penguatan peran asosiasi profesi guru dan mitra pembangunan				
6. Pengembangan mekanisme jenjang karier guru				

Isu

 Kurangnya kapasitas kepala satuan pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran

 Disparitas kebijakan pemimpin daerah dalam menentukan prioritas kebijakan

 Perlunya peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di pusat dan daerah

Program Pembangunan **07** Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

Strategi

- ➔ Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan
- ➔ Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- ➔ Penyediaan Sistem Informasi Data Pendidikan
- ➔ Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
- ➔ Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

Arah Kebijakan 1/3

Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan					
Indikator:					
1. Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B					
a. TK/RA/BA	62,00				
b. SD/MI/ sederajat	82,69				
c. SMP/MTs/ sederajat	71,91				
d. SMA/SMK/MA/ sederajat	77,61				
2. Persentase Pemerintah Daerah yang telah memenuhi minimal 20% anggaran pendidikan dari APBD (di luar DAK)	60,18				95
Strategi/Fokus Pelaksanaan		Tahap Pelaksanaan			
		2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Strategi I: Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan					
1. Penyelarasan kurikulum magister pendidikan dengan rujukan kompetensi kepala satuan pendidikan					
2. Penguatan mekanisme rekrutmen kepala satuan pendidikan melalui jalur kualifikasi dan/atau pelatihan terstandar					
3. Program mentoring terstandar bagi calon kepala satuan pendidikan					
4. Pengembangan profesi kepala satuan pendidikan					
5. Penguatan peran pengawas/penilik sebagai pendamping kepala satuan pendidikan					

Arah Kebijakan 2/3

Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan



Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan				
Strategi 2: Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan				
1. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan daerah untuk pencapaian indikator SPM pendidikan daerah				
2. Penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui kemitraan dengan LPTK dan unit pelaksana teknis				
3. Penguatan peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses belajar berkelanjutan para pendidik				
4. Penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik				
Strategi 3: Penyediaan Sistem Informasi Data Pendidikan				
1. Penyempurnaan sistem asesmen nasional, rapor pendidikan, dan akreditasi sebagai sumber data evaluasi sistem pendidikan				
2. Penguatan kualitas pangkalan data pendidikan serta kemudahan akses dan penggunaan				
3. Penguatan mekanisme integrasi data untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan				
Strategi 4: Penguatan Sistem Penjaminan Mutu				
1. Pemanfaatan data evaluasi sistem pendidikan				
2. Penguatan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan strategi pengelolaan berdasarkan data evaluasi sistem pendidikan				
3. Peningkatan kapasitas unit pelaksana teknis di daerah				
4. Penguatan keselarasan antara rujukan kompetensi yang digunakan oleh lembaga sertifikasi dengan lembaga pendidikan				
5. Penguatan keselarasan antara rujukan kinerja (norma, standar, prosedur, kriteria) satuan pendidikan dengan kerangka penjaminan mutu				

Arah Kebijakan 3/3

Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan



Strategi/Fokus Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan			
	2025-2029	2029-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan				
Strategi 5: Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan				
1. Penguatan sinkronisasi perencanaan terhadap anggaran pendidikan di pusat dan daerah				
2. Penguatan mekanisme bagi daerah dalam pemanfaatan pembiayaan inovatif sesuai regulasi yang berlaku untuk mengakselerasi pencapaian indikator SPM Pendidikan daerah				
3. Penerapan strategi pendanaan pendidikan asimetris yang sesuai dengan konteks/karakteristik daerah				
4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan				



Kementerian PPN/
Bappenas



Photo credit: @Edi Purnomo/INOVASI

Daftar Isi

- Sistematika Penulisan
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Analisis Situasi dan Isu Strategis
- Bab III Kerangka Pikir
- Bab IV Sasaran Pendidikan 2045
- Bab V Arah Kebijakan
- **Bab VI Kaidah Pelaksanaan**
- Bab VII Mekanisme Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan

Kaidah Pelaksanaan

1 Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Kementerian/lembaga

1. Merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata;
2. Mengelola anggaran pendidikan secara berintegritas; dan
3. Memastikan akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas.

Pemerintah Daerah

1. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan sesuai kewenangannya serta memastikan kemudahan akses bagi peserta didik terhadap layanan pendidikan.
2. Menjamin keselamatan guru dalam melaksanakan tugas, memenuhi kebutuhan hidup yang layak di daerah 3T, melakukan mitigasi dan penyelesaian konflik sosial, serta memastikan tata kelola pendidikan berjalan secara akuntabel, transparan, dan efektif.

Swasta/Dudika

Berkontribusi melalui program kemitraan, pelatihan dan magang yang memperkaya pengalaman praktis serta keterampilan anak muda dalam dunia kerja terutama yang menempuh jalur vokasi

Mitra Pembangunan Pendidikan

1. Memberikan dukungan terhadap pembangunan pendidikan, seperti sarana prasarana, beasiswa, pelatihan, pendampingan; dan
2. Turut andil mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Organisasi Masyarakat dan Media

1. Membentuk karakter individu yang berakhlak,
2. Menyediakan jaminan keamanan sosial di sekitar satuan pendidikan; dan
3. Memberikan bantuan pendidikan berbasis ikatan sosial/gotong royong.



2 Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan

Kerangka Kelembagaan



- Untuk menjamin tersedianya lembaga yang dapat mengakselerasi pencapaian sasaran pendidikan
- Meliputi keberadaan sumber daya manusia yang mumpuni dan berintegritas
- Diperlukan pengembangan kapasitas staf K/L yang berkinerja, serta budaya kerja yang mengakomodasi aparatur guna meningkatkan kompetensinya sehingga dapat melaksanakan kebijakan/program

Kerangka Regulasi



Berfungsi sebagai koridor dan navigasi dalam sinkronisasi kebijakan dan sinergi antarpemangku kepentingan pembangunan pendidikan

Kerangka Pendanaan



- Diperlukan mekanisme pendanaan agar setiap kebijakan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dan berkelanjutan sesuai sasaran indikator Pembangunan Pendidikan
- Pendanaan pembangunan pendidikan bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat. Kerangka pendanaan pembangunan pendidikan tahun 2025-2045 mengoptimalkan pemanfaatan 20 persen anggaran pendidikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

3 Koordinasi Lintas Sektoral

Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat karena pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga maupun organisasi perangkat daerah yang menangani urusan bidang pendidikan.



Photo credit: @Edi Purnomo/INOVASI

Daftar Isi

- Sistematika Penulisan
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Analisis Situasi dan Isu Strategis
- Bab III Kerangka Pikir
- Bab IV Sasaran Pendidikan 2045
- Bab V Arah Kebijakan
- Bab VI Kaidah Pelaksanaan
- **Bab VII Mekanisme Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan**



Sinkronisasi Kebijakan

Menyelaraskan kebijakan antarpemangku kepentingan serta antarwaktu, perlu memastikan substansi Peta Jalan Pendidikan Indonesia terinternalisasi dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Mengembangkan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

- Pemantauan pelaksanaan masing-masing fokus pelaksanaan
- Evaluasi capaian indikator
- Pelaporan secara bertahap dan berjenjang pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan



Kementerian PPN/
Bappenas



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Jl. Taman Suropati No.2, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jl. Jenderal Sudirman Lantai 2, Senayan, Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Kementerian Agama

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710